

Executive Summary

IMPLEMENTASI DAN OPTIMALISASI PROGRAM KAMPUNG KB DI PANTAI TIMUR SUMATERA UTARA TAHUN 2018

ABSTRAK

Permasalahan kependudukan terkait dengan jumlah penduduk yang besar menjadi sebuah masalah yang tidak dapat dihindarkan. Indonesia memiliki berbagai potensi terjadinya konflik. Indonesia merupakan salah satu negara berkembang, dimana masih banyak terjadi masalah yang cukup kompleks terkait kependudukan. Jumlah penduduk Indonesia masih menempati urutan keempat di dunia setelah negara Cina, India, dan Amerika Serikat. Perkiraan pemerintah, jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2013 akan mencapai 252.124.458 jiwa, dan akan terus bertambah pada tahun 2015 hingga mencapai 270 juta jiwa. (bps.go.id) dengan jumlah sedemikian banyaknya tentu bukan persoalan yang mudah dalam mengatasi persoalan penduduk. Benturan antara berbagai kepentingan dengan berbagai organisasi masa lainnya membuat masalah besarnya populasi menjadi hambatan. Selain itu yang terpenting terkait dengan permasalahan penyediaan sumber daya alam dan berbagai kebutuhan penting lainnya. Adanya tekanan penduduk terhadap daya dukung lingkungan menjadi masalah yang sangat rumit. Kepentingan untuk membangun tempat tinggal dan ruang gerak sangatlah penting namun di sisi lain terdapat kepentingan yang terkait dengan permasalahan lingkungan seperti halnya sebagai daerah aliran sungai, daerah resapan air, pertanian, penyediaan sumber daya alam, dll. Kedua hal tersebut tidak dapat dipisahkan dan keduanya perlu mendapatkan perhatian yang sama demi keseimbangan alam.

Kepadatan penduduk adalah jumlah penduduk disuatu wilayah dibandingkan dengan luas wilayahnya yang dihitung jiwa per km kuadrat. Berdasarkan sensus penduduk dan survey penduduk, persebaran penduduk Indonesia antar provinsi yang satu dengan provinsi yang lain tidak merata. Di Indonesia sendiri terjadi konsentrasi kepadatan penduduk yang berpusat di Pulau Jawa. Hampir lebih dari 50% jumlah penduduk Indonesia mendiami Jawa. Hal ini menjadi masalah apabila pusat pemerintahan, informasi, transportasi, ekonomi, dan berbagai fasilitas hanya berada di satu wilayah. Penduduk akan berusaha untuk melakukan migrasi dan akhirnya akan berdampak pada permasalahan pemerataan pembangunan.

Kampung KB adalah merupakan suatu program dimana program ini mencoba memadukan konsep pembangunan terpadu bidang Kependudukan. Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKB-PK). Kampung KB merupakan salah satu upaya menjadikan program KKB-PK sebagai program yang diselenggarakan dari, oleh, dan untuk masyarakat. Kampung KB berupaya memberdayakan dan memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan total program KB sebagai upaya mewujudkan keluarga sejahtera yang berkualitas. Sejak Kampung KB ini dicanangkan oleh Bapak Presiden RI (Ir.Joko Widodo) pada bulan januari 2016, bahwa Kampung KB ini

banyak diperbincangkan oleh masyarakat mulai dari kalangan bawah, menengah sampai kepada masyarakat kalangan elit, dan bahkan tulisan-tulisan mengenai kampung KB banyak mengisi kolom-kolom pemberitaan di media massa (surat kabar, majalah, tabloid) dan bahkan menjadi pemberitaan yang cukup hangat dan populer di media-media elektronik. Lantas kenapa kampung KB ini dibentuk.

Partisipasi berbagai instansi dalam kampung KB sangat penting sehingga pelayanan paripurna dapat dirasakan langsung oleh masyarakat menuju kesejahteraan rakyat. Kampung KB berupaya memberdayakan dan memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan total program KB sebagai upaya mewujudkan keluarga sejahtera yang berkualitas. Menjadikan Kampung KB sebagai wahana pemberdayaan masyarakat bukanlah sesuatu yang mustahil, dan untuk mewujudkan harapan tersebut tidak cukup hanya dengan membuat kesepakatan atau komitmen diatas kertas, namun perlu ketekunan, kesabaran, kebersamaan serta kerja keras yang diaplikasikan dalam wujud nyata, lebih-lebih membangun masyarakat pinggiran. Tapi dengan kebersamaan pasti semuanya akan lebih mudah diatasi, karena membangun masyarakat dari pinggiran bukanlah semata-mata harapan, melainkan lebih kepada bagaimana memposisikan Program KB sebagai upaya membangun kesejahteraan dengan prioritas masyarakat yang membutuhkan uluran tangan dari pemerintah. Inilah wujud dari revolusi mental untuk mempersiapkan generasi muda sehingga bisa menikmati bonus demografi dengan dukungan sumber daya manusia berkualitas. Namun sumber daya manusia yang berkualitas hanya mungkin tercipta apabila ada kompetensi, ada pembinaan yang sungguh-sungguh, dan Kampung KB inilah yang diharapkan dapat menjadi wahana untuk hal tersebut. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah : Menganalisis implementasi program kampung KB di wilayah pesisir timur Sumut. Menganalisis optimalisasi pelaksanaan program kampung KB di wilayah Sumut bagian pesisir timur. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif menggambarkan fenomena yang terjadi dan memberikan suatu kesimpulan yang dijadikan rekomendasi. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis implementasi Program Kampung KB dan optimalisasi pelaksanaan program KB. Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Batubara, Kabupaten Asahan dan Kabupaten Labuhan Batu Utara.

Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder, pengumpulan data primer dengan observasi, wawancara dan penyebaran angket langsung kepada responden yang dijadikan sampel. Data sekunder berupa data yang berasal dari BPS, BKKBN dan dinas terkait. Populasi dalam penelitian ini adalah kampung KB yang ada di 3 Kabupaten di Pantai Timur yang juga dijadikan sebagai sampel. Jadi penelitian ini dinamakan penelitian sensus. Analisis deskriptif untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Hasil penelitian ini menyimpulkan di Labura : pada kuadran A yaitu Prioritas Utama. Faktor-faktor yang termasuk dalam kuadran ini adalah : Frekuensi kegiatan seksi keagamaan di Kampung KB (5). Frekuensi kegiatan seksi pendidikan di Kampung KB (6). Frekuensi kegiatan seksi perlindungan di Kampung KB (9). Frekuensi kegiatan seksi perlindungan di Kampung KB (10). Frekuensi kegiatan seksi sosial budaya di Kampung KB (11). Frekuensi kegiatan seksi pembinaan lingkungan di Kampung KB (12). Pertemuan

evaluasi pelaksanaan rencana kerja POKJA dengan mitra di Kampung KB (13). Jumlah Kesertaan ber-KB per Mix Kontrasepsi di Kampung KB (14). Jumlah PUS yang tidak pakai KB di Kampung KB (15). Bapak/Ibu puas terhadap Jumlah BKL di Kampung KB(18). Cakupan Kesertaan Keluarga dalam Poktan di Kampung KB (19). Semakin berkembangnya budi pekerti, tata krama dan seni budaya baik di keluarga maupun masyarakat sekampung (20). Semakin tertatanya lingkungan yang serasi selaras dan seimbang antara perilaku dan lingkungan (21).

Kesimpulan di Batubara : Kuadran A Menunjukkan faktor-faktor atau atribut yang mempengaruhi optimalisasi implementasi program Kampung KB berada dalam kuadran ini dan penanganannya perlu diprioritaskan, karena keberadaan faktor-faktor inilah yang dinilai sangat penting oleh masyarakat dan efektivitas kinerja petugas, sedangkan tingkat pelaksanaannya masih belum memuaskan. Faktor-faktor yang termasuk dalam kuadran ini adalah : Jumlah tenaga pengelola kampung di Kampung KB sudah (1). Jumlah Kepemilikan Sarana dan Prasarana di Kampung KB (2). Jumlah Dana di Kampung KB sudah (4). Frekuensi kegiatan kasih sayang di Kampung KB(10). Frekuensi kegiatan seksi sosial budaya di Kampung KB(11). Frekuensi kegiatan seksi pembinaan lingkungan di Kampung KB (12). Jumlah PUS yang tidak pakai KB di Kampung KB(15). Jumlah BKB di Kampung KB(16). Semakin tertatanya lingkungan yang serasi selaras dan seimbang antara perilaku dan lingkungan (21). Kesimpulan Kabupaten Asahan Kuadran A. Faktor-faktor yang termasuk dalam kuadran ini adalah : Jumlah Kepemilikan Sarana dan Prasarana di Kampung KB (2). Frekuensi kegiatan seksi ekonomi di Kampung KB (8). Frekuensi kegiatan seksi perlindungan di Kampung KB(9). Frekuensi kegiatan kasih sayang di Kampung KB(10). Frekuensi kegiatan seksi sosial budaya di Kampung KB(11). Jumlah PUS yang tidak pakai KB di Kampung KB(15).

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Jumlah penduduk yang besar memiliki andil dalam berbagai permasalahan lingkungan dan aspek lainnya. Jumlah penduduk yang besar tentunya membutuhkan ruang yang lebih luas dan juga kebutuhan yang lebih banyak namun lahan dan juga wilayah Indonesia tidaklah bertambah. Oleh karena itu, perencanaan yang matang sangatlah diperlukan guna penentuan kebijakan terkait dengan besarnya jumlah penduduk Indonesia. Terkait dengan jumlah penduduk yang tinggi tentunya terdapat faktor yang mempengaruhinya. Salah satunya adalah tingkat atau laju pertumbuhan penduduk. Besarnya laju pertumbuhan penduduk membuat pertambahan jumlah penduduk semakin meningkat. Semakin besar persentase kenaikannya maka semakin besar jumlah penduduknya. Kenaikan ini tentunya membawa dampak bagi kependudukan Indonesia. Dalam penentuan kebijakan semakin banyak yang perlu dipertimbangkan baik dalam hal penyediaan berbagai sarana dan prasarana, fasilitas-fasilitas umum dan yang terpenting adalah kebijakan dalam rangka mengurangi laju pertumbuhan yang ada di Indonesia. Dari situlah muncul program KB dan kini ditangani oleh BKKBN.

Jika melihat grafik di atas, Selama empat tahun terakhir ini jumlah penduduk Sumatera Utara terus meningkat pesat meski laju pertumbuhan penduduk menunjukkan kecenderungan menurun. Data Sensus Penduduk tahun 2012 dari Badan Pusat Statistik (BPS, 2016) sebesar 13.000.998 jiwa, terjadi kenaikan dalam empat tahun hasil Sensus penduduk tahun 2016 sebesar 14.212.011 jiwa (BPS, 2016). Data hasil sensus menunjukkan setiap empat tahun terjadi kenaikan kurang lebih 1 juta jiwa. Namun, alangkah lebih baik apabila persentase pertumbuhannya semakin menurun hingga mencapai angka dibawah 1%. Dalam pengelompokkan negara-negara, negara-negara maju selalu memiliki angka pertumbuhan penduduk di bawah 1% atau bahkan 0%. Melihat dari jumlah penduduk Indonesia yang tinggi, penekanan agar laju pertumbuhan penduduk dapat menurun merupakan langkah yang baik guna menjaga kualitas sumber daya manusia Indonesia.

Apabila tingginya tingkat pertumbuhan penduduk terus dibiarkan maka akan terjadi berbagai masalah baik masalah pengangguran, tingkat kualitas sumber daya manusia yang menurun, kejahatan, lapangan pekerjaan dll yang memberikan dampak negatif bagi kelangsungan umat manusia Indonesia khususnya. Oleh karena itu, usaha untuk menekan laju pertumbuhan sangatlah penting. Program-program yang ditawarkan pemerintah harus didukung oleh masyarakat seperti halnya KB, penggunaan alat kontrasepsi, penundaan usia perkawinan, dll sehingga penurunan laju pertumbuhan penduduk diharapkan menurun.

Kepadatan penduduk adalah jumlah penduduk disuatu wilayah dibandingkan dengan luas wilayahnya yang dihitung jiwa per km kuadrat. Berdasarkan sensus penduduk dan survey penduduk, persebaran penduduk Indonesia antar provinsi yang satu dengan provinsi yang lain tidak merata. Di Indonesia sendiri terjadi konsentrasi kepadatan penduduk yang berpusat di Pulau Jawa. Hampir lebih dari 50% jumlah penduduk Indonesia mendiami Jawa. Hal ini menjadi masalah apabila pusat pemerintahan, informasi, transportasi, ekonomi, dan berbagai fasilitas hanya berada di satu wilayah. Penduduk akan berusaha untuk melakukan migrasi dan akhirnya akan berdampak pada permasalahan pemerataan pembangunan.

Kampung KB didesain sebagai upaya pemberdayaan masyarakat terhadap pengelolaan program KB. Kegiatannya dikelola berdasarkan prinsip dari, oleh, dan untuk masyarakat itu sendiri. Tujuan akhirnya tentu pembangunan masyarakat itu sendiri. Pemerintah hanya menstimulasi dan melakukan pendampingan, selebihnya menjadi tanggungjawab masyarakat. Yakni melalui upaya menjadikan kampung KB sebagai program yang diselenggarakan dari, oleh, dan untuk masyarakat.

Partisipasi berbagai instansi dalam kampung KB sangat penting sehingga pelayanan paripurna dapat dirasakan langsung oleh masyarakat menuju kesejahteraan rakyat. Kampung KB berupaya memberdayakan dan memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan total program KB sebagai upaya mewujudkan keluarga sejahtera yang berkualitas. Menjadikan

Kampung KB sebagai wahana pemberdayaan masyarakat bukanlah sesuatu yang mustahil, dan untuk mewujudkan harapan tersebut tidak cukup hanya dengan membuat kesepakatan atau komitmen di atas kertas, namun perlu ketekunan, kesabaran, kebersamaan serta kerja keras yang diaplikasikan dalam wujud nyata, lebih-lebih membangun masyarakat pinggiran, tapi dengan kebersamaan pasti semuanya akan lebih mudah diatasi, karena membangun masyarakat dari pinggiran bukanlah semata-mata harapan, melainkan lebih kepada bagaimana memposisikan Program KB sebagai upaya membangun kesejahteraan dengan prioritas masyarakat yang membutuhkan uluran tangan dari pemerintah. Inilah wujud dari revolusi mental untuk mempersiapkan generasi muda sehingga bisa menikmati bonus demografi dengan dukungan sumber daya manusia berkualitas, namun sumber daya manusia yang berkualitas hanya mungkin tercipta apabila ada kompetensi, ada pembinaan yang sungguh-sungguh, dan Kampung KB inilah yang diharapkan dapat menjadi wahana untuk hal tersebut.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Apakah yang menjadi prioritas utama dan optimalisasi dalam implementasi program kampung KB di wilayah pesisir timur Sumut?
2. Apakah yang menjadi alasan untuk mempertahankan prestasi dan optimalisasi dalam implementasi program kampung KB di wilayah pesisir timur Sumut?
3. Apakah yang menjadi prioritas rendah dan optimalisasi dalam implementasi program kampung KB di wilayah pesisir timur Sumut?
4. Apakah yang menjadi berlebihan dan optimalisasi dalam implementasi program kampung KB di wilayah pesisir timur Sumut?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Menganalisis apakah yang menjadi prioritas utama dan optimalisasi dalam implementasi program kampung KB di wilayah pesisir timur Sumut

2. Menganalisis apakah yang menjadi alasan untuk mempertahankan prestasi dan optimalisasi dalam implementasi program kampung KB di wilayah pesisir timur Sumut
3. Menganalisis apakah yang menjadi prioritas rendah dan optimalisasi dalam implementasi program kampung KB di wilayah pesisir timur Sumut
4. Menganalisis apakah yang menjadi berlebihan dan optimalisasi dalam implementasi program kampung KB di wilayah pesisir timur Sumut

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dalam penelitian ini :

1. Sebagai masukan kepada pemerintah daerah dalam mengantisipasi implementasi Kampung KB.
2. Sebagai bahan referensi dan pemetaan kebijakan dalam mengoptimalkan pelaksanaan program kampung KB

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

1. Konsep Kependudukan

Dengan meningkatnya laju pertumbuhan penduduk dunia menyebabkan jumlah penduduk meningkat dengan cepat dan di beberapa bagian dunia telah terjadikemiskinan dan kekurangan pangan. Sehingga muncul beberapa kelompok aliran/teori tentang kependudukan Soegimo (2009)., yaitu : Aliran Malthusian (Thomas Robert Malthus)

Robert Malthus ini mengemukakan beberapa pendapat tentang kependudukan, yaitu :

- 1) Penduduk (seperti juga tumbuhan dan binatang) apabila tidak ada pembatasan akan berkembang biak dengan sangat cepat dan memenuhi dengan cepat beberapa bagian dari permukaan bumi.
- 2) Manusia untuk hidup memerlukan bahan makanan, sedangkan laju pertumbuhan makanan jauh lebih lambat (deret hitung) dibandingkan dengan laju pertumbuhan penduduk (deret ukur) Daldjoeni (1989)

Aliran Neo Malthusian (Garreth Hardin Dan Paul Ehrlich)

Pada abad 19–20, Teori Malthus kembali diperdebatkan, muncul kelompok aliran Neo Malthusian yang menyokong teori Malthus. Namun, menurut aliran Neo Malthus, mengurangi jumlah penduduk tidak hanya dengan moral restrain saja, tapi lebih ditekankan pada Preventive check. Misalnya penggunaan alat kontrasepsi untuk mengurangi kelahiran. Aliran Neomalthusian memiliki kesamaan konsep dasar dengan Malthusian yaitu percaya bahwa pertumbuhan penduduk pasti akan terjadi dan berdampak negatif pada manusia walaupun tidak secara persis setuju dengan argumen argumen aliran Malthusian, beberapa argumen Malthus dianggap tidak rasional oleh karena itu aliran ini lebih ekstrim dalam melakukan tindakan tindakan untuk mengurangi jumlah penduduk, misalnya: aborsi, legalitas homoseksual, hukuman mati Daldjoeni (1989).

2. Sumber Data Kependudukan

A. Sensus Penduduk

Data sensus yang dikumpulkan meliputi karakteristik demografi, ketenagakerjaan, dan sosial budaya. Karakteristik demografi yang dikumpulkan adalah mengenai kelahiran, kematian, dan migrasi, serta riwayat kelahiran dan kematian anak dari wanita pernah kawin. Data yang dihimpun pada bidang ketenagakerjaan mencakup lapangan usaha, jenis pekerjaan, dan status pekerjaan, sedangkan data sosial budaya mencakup tingkat pendidikan, kondisi tempat tinggal, dan kegiatan penduduk lanjut usia (lansia). Data-data yang diperoleh dari sensus tersebut digunakan untuk perencanaan pembangunan di berbagai bidang. Hal tersebut sangat berperan penting untuk mengetahui tingkat keberhasilan pembangunan, baik di bidang kependudukan, sosial budaya, dan ketenagakerjaan.

3. Komposisi Penduduk

Struktur penduduk berdasarkan umur dan jenis kelamin dinamakan piramida penduduk. Piramida penduduk pada umumnya disajikan dalam bentuk grafik batang yang menggambarkan jumlah penduduk laki-laki dan perempuan pada setiap kelompok usia tertentu. Rentang interval umur yang umumnya digunakan adalah lima tahun (usia 0-4, 5-9, 10-14, 15-19, 20-24, 25-29, 30-34, 35-39, 40-44, 45-49, 50-54, 55-59, 60-64, 65-69, 70-74, 75 tahun lebih) Goeltenboth (1996).

Berdasarkan kecenderungan bentuknya, komposisi penduduk berdasarkan usia dan jenis kelamin diklasifikasikan menjadi tiga, yaitu sebagai berikut:

1. Komposisi penduduk muda (Ekspansif),
dengan bentuk piramida penduduk menyerupai kerucut. Ciri-ciri komposisi penduduk ekspansif antara lain sebagai berikut:
 - a) Jumlah penduduk usia muda (0–19 tahun) sangat besar, sedangkan usia tua sedikit.
 - b) Angka kelahiran jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan angka kematian.
 - c) Pertumbuhan penduduk relatif tinggi.
 - d) Sebagian besar terdapat di negara-negara berkembang, seperti Indonesia, Malaysia, Thailand, Republik Rakyat Cina, Mesir, dan India.

2. Komposisi penduduk dewasa (Stasioner),

dengan bentuk piramida penduduk menyerupai batu nisan. Ciri-ciri komposisi penduduk stasioner antara lain sebagai berikut:

- a) Perbandingan jumlah penduduk pada kelompok usia muda dan dewasa relatif seimbang.
- b) Tingkat kelahiran umumnya tidak begitu tinggi, demikian pula dengan angka kematian relatif lebih rendah.
- c) Pertumbuhan penduduk kecil.
- d) Terdapat di beberapa negara maju antara lain Amerika Serikat, Belanda, dan Inggris.

3. Komposisi penduduk tua (Konstruktif),

dengan bentuk piramida penduduk menyerupai guci terbalik. Ciri-ciri komposisi penduduk konstruktif antara lain sebagai berikut:

- a) Jumlah penduduk usia muda (0–19 tahun) dan usia tua (di atas usia 64 tahun) sangat kecil.
- b) Jumlah penduduk yang tinggi terkonsentrasi pada kelompok usia dewasa.
- c) Angka kelahiran sangat rendah, demikian juga angka kematian.
- d) Pertumbuhan penduduk sangat rendah mendekati nol, bahkan pertumbuhan penduduk sebagian mencapai tingkat negatif.
- e) Jumlah penduduk cenderung berkurang dari tahun ke tahun.
- f) Negara yang berada pada fase ini, antara lain Swedia, Jerman, dan Belgia.

B. Rasio Jenis Kelamin (sex ratio)

Sex ratio menunjukkan perbandingan antara jumlah penduduk laki-laki dan perempuan. Adanya perbandingan jumlah penduduk laki-laki dengan jumlah penduduk wanita dapat digunakan untuk memperkirakan atau memprediksi keadaan jumlah penduduk di masa datang. Kemungkinan terjadinya ledakan penduduk akan lebih besar, kalau jumlah penduduk wanita lebih banyak dibandingkan jumlah penduduk laki-laki.

C. Angka Beban Ketergantungan (*dependency ratio*)

Menurut Bintarto rasio ketergantungan (*dependency ratio*) atau angka beban ketergantungan adalah suatu angka yang menunjukkan besar beban tanggungan

kelompok usia produktif atas penduduk usia nonproduktif. Usia produktif adalah usia penduduk antara 15 tahun sampai 59 tahun. Disebut produktif karena pada usia ini diperkirakan orang ada pada rentang usia masih bisa bekerja, baik di sektor swasta maupun sebagai Pegawai Negeri Sipil. Sedangkan usia tidak produktif adalah usia penduduk yang ada di rentang 60 tahun keatas. Pertimbangannya, bahwa pada usia ini penduduk dipandang sudah tidak produktif lagi bekerja atau tidak diperkenankan lagi bekerja, baik di sektor swasta ataupun sebagai pegawai negeri.

4. Pertumbuhan dan Faktor yang mempengaruhi Penduduk

Jumlah penduduk senantiasa berubah dari waktu ke waktu. Terdapat beragam faktor yang menyebabkan perubahan jumlah penduduk. Misalnya, peperangan, wabah penyakit atau epidemi, kelaparan, dan bencana alam. Di lain pihak, kestabilan negara, peningkatan gizi, dan kesehatan dapat mengakibatkan jumlah penduduk cenderung naik. Fenomena bertambah atau berkurangnya jumlah penduduk dari waktu ke waktu dalam suatu wilayah tertentu dinamakan dinamika penduduk. Sehingga pertumbuhan penduduk dapat diartikan suatu keadaan jumlah penduduk yang dipengaruhi oleh berbagai variabel.

5. Masalah Kependudukan

A. Masalah Penduduk yang Bersifat Kuantitatif

a. Jumlah Penduduk Besar

Penduduk dalam suatu negara menjadi faktor terpenting dalam pelaksanaan pembangunan karena menjadi subjek dan objek pembangunan. Manfaat jumlah penduduk yang besar:

- 1) Penyediaan tenaga kerja dalam masalah sumber daya alam.
- 2) Mempertahankan keutuhan negara dari ancaman yang berasal dari bangsa lain.
- 3) Selain manfaat yang diperoleh, ternyata negara Indonesia yang berpenduduk besar, yaitu nomor 4 di dunia menghadapi masalah yang cukup rumit yaitu:
- 4) Pemerintah harus dapat menjamin terpenuhinya kebutuhan hidupnya. Dengan kemampuan pemerintah yang masih terbatas masalah ini sulit

diatasi sehingga berakibat seperti masih banyaknya penduduk kekurangan gizi makanan, timbulnya pemukiman kumuh.

- 5) Penyediaan lapangan kerja, sarana dan prasarana kesehatan dan pendidikan serta fasilitas sosial lainnya. Dengan kemampuan dana yang terbatas masalah ini cukup sulit diatasi, oleh karena itu pemerintah menggalakkan peran serta sektor swasta untuk mengatasi masalah ini.

b. Pertumbuhan Penduduk Cepat

Secara nasional pertumbuhan penduduk Indonesia masih relatif cepat, walaupun ada kecenderungan menurun. Antara tahun 1961 – 1971 pertumbuhan penduduk sebesar 2,1 % pertahun, tahun 1971 – 1980 sebesar 2,32% pertahun, tahun 1980 – 1990 sebesar 1,98% pertahun, dan periode 1990 – 2000 sebesar 1,6% pertahun dan periode 2000-2010 sebesar 1,49% periode 2010-2016 sebesar 1,32%.

c. Persebaran Penduduk Tidak Merata

Persebaran penduduk di Indonesia tidak merata baik persebaran antarpulau, provinsi, kabupaten maupun antara perkotaan dan pedesaan. Pulau Jawa dan Madura yang luasnya hanya $\pm 7\%$ dari seluruh wilayah daratan Indonesia, dihuni lebih kurang 60% penduduk Indonesia. Perkembangan penduduk di Pulau Jawa dan Madura tergolong tinggi, yaitu tahun 1980 sebesar 690 jiwa tiap-tiap kilometer persegi, tahun 1990 menjadi 814 jiwa dan tahun 1998 menjadi 938 jiwa per kilo meter persegi (km^2), tahun 2000 menjadi 1235 dan tahun 2016 sebesar 2238.

Selain di Jawa ketimpangan persebaran penduduk terjadi di Irian Jaya dan Kalimantan. Luas wilayah Irian Jaya 21,99% dari luas Indonesia, tetapi jumlah penduduknya hanya 0,92% dari seluruh penduduk Indonesia. Pulau Kalimantan luasnya 28,11% dari luas Indonesia, tetapi jumlah penduduknya hanya 5% dari jumlah penduduk Indonesia.

Akibat dari tidak meratanya penduduk, yaitu luas lahan pertanian di Jawa semakin sempit. Lahan bagi petani sebagian dijadikan permukiman dan industri. Sebaliknya banyak lahan di luar Jawa belum dimanfaatkan secara optimal karena kurangnya sumber daya manusia. Sebagian besar tanah di luar Jawa dibiarkan begitu saja tanpa ada kegiatan pertanian. Keadaan demikian tentunya sangat tidak

menguntungkan dalam melaksanakan pembangunan wilayah dan bagi peningkatan pertahanan keamanan negara.

Persebaran penduduk antara kota dan desa juga mengalami ketidakseimbangan. Perpindahan penduduk dari desa ke kota di Indonesia terus mengalami peningkatan dari waktu ke waktu. Urbanisasi yang terus terjadi menyebabkan terjadinya pemusatan penduduk di kota yang luas wilayahnya terbatas. Pemusatan penduduk di kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Medan dan kota-kota besar lainnya dapat menimbulkan dampak buruk terhadap lingkungan hidup seperti:

- a) Munculnya permukiman liar.
- b) Sungai-sungai tercemar karena dijadikan tempat pembuangan sampah baik oleh masyarakat maupun dari pabrik-pabrik industri.
- c) Terjadinya pencemaran udara dari asap kendaraan dan industri.
- d) Timbulnya berbagai masalah sosial seperti perampokan, pelacuran dan lain-lain.

B. Masalah Penduduk yang Bersifat Kualitatif

a. Tingkat Pendidikan yang Rendah

Meskipun telah mengalami perbaikan, tetapi kualitas kesehatan penduduk Indonesia masih tergolong rendah. Indikator untuk melihat kualitas kesehatan penduduk adalah dengan melihat:

- 1) Angka Kematian
- 2) Angka Harapan Hidup

Angka kematian yang tinggi menunjukkan tingkat kesehatan penduduk yang rendah. Angka harapan hidup yang tinggi menunjukkan tingkat kesehatan penduduk yang baik. Kualitas kesehatan penduduk tidak dapat dilepaskan dari pendapatan penduduk. Semakin tinggi pendapatan penduduk maka pengeluaran untuk membeli pelayanan kesehatan semakin tinggi. Penduduk yang pendapatannya tinggi dapat menikmati kualitas makanan yang memenuhi standar kesehatan.

b. Tingkat Kesehatan yang Rendah

Keadaan penduduk di negara-negara yang sedang berkembang tingkat pendidikannya relatif lebih rendah dibandingkan penduduk di negara-negara maju, demikian juga dengan tingkat pendidikan penduduk Indonesia. Tingkat pendidikan bukanlah satu-satunya indikator untuk mengukur kualitas SDM penduduk suatu negara. Kualitas SDM berhubungan dengan produktivitas kerja. Orang yang tingkat pendidikannya tinggi diharapkan punya produktivitas yang tinggi. Kenyataan yang terjadi di Indonesia adalah banyak orang berpendidikan tinggi (sarjana) tetapi menganggur. Keadaan demikian tentu sangat memprihatinkan. Orang yang menganggur menjadi beban bagi orang lain (keluarganya). Tingkat pendidikan diharapkan berbanding lurus dengan tingkat kesejahteraan. Sehingga pembangunan dalam bidang pendidikan yang dilakukan oleh pemerintah membawa dampak positif yang signifikan terhadap kesejahteraan penduduk.

Rendahnya tingkat pendidikan penduduk Indonesia disebabkan oleh:

- 1) Pendapatan perkapita penduduk rendah, sehingga orang tua/penduduk tidak mampu sekolah atau berhenti sekolah sebelum tamat.
- 2) Ketidakseimbangan antara jumlah murid dengan sarana pendidikan yang ada seperti jumlah kelas, guru dan buku-buku pelajaran. Ini berakibat tidak semua anak usia sekolah tertampung belajar di sekolah.
- 3) Masih rendahnya kesadaran penduduk terhadap pentingnya pendidikan, sehingga banyak orang tua yang tidak menyekolahkan anaknya.
- 4) Dampak yang ditimbulkan akibat dari rendahnya tingkat pendidikan terhadap pembangunan adalah :
- 5) Rendahnya penguasaan teknologi maju, sehingga harus mendatangkan tenaga ahli dari negara maju. Keadaan ini sungguh ironis, di mana keadaan jumlah penduduk Indonesia besar, tetapi tidak mampu mencukupi kebutuhan tenaga ahli yang sangat diperlukan dalam pembangunan.
- 6) Perumahan kumuh sebagai dampak permasalahan kependudukan
- 7) Rendahnya tingkat pendidikan mengakibatkan sulitnya masyarakat menerima hal-hal yang baru. Hal ini tampak dengan ketidakmampuan masyarakat merawat hasil pembangunan secara benar, sehingga banyak fasilitas umum yang rusak karena ketidakmampuan masyarakat

memperlakukan secara tepat. Kenyataan seperti ini apabila terus dibiarkan akan menghambat jalannya pembangunan.

c. Tingkat Pendapatan (Kemakmuran) yang Rendah

Meskipun tidak termasuk negara miskin, jumlah penduduk Indonesia yang hidup di bawah garis kemiskinan cukup besar. Sebanyak 37,5 juta penduduk Indonesia hidup di bawah garis kemiskinan menurut standard yang ditetapkan PBB. Kemakmuran berbanding lurus dengan kualitas SDM. Semakin tinggi kualitas SDM penduduk, semakin tinggi pula tingkat kemakmurannya. Banyak negara yang miskin sumber daya alam tetapi tingkat kemakmuran penduduknya tinggi. Indonesia dikenal sebagai negara yang kaya sumber daya alam.

Dengan pendapatan perkapita yang masih rendah berakibat penduduk tidak mampu memenuhi berbagai kebutuhan hidupnya, sehingga sulit mencapai manusia yang sejahtera. Pendapatan per kapita rendah juga berakibat kemampuan membeli (daya beli) masyarakat rendah, sehingga hasil-hasil industri harus disesuaikan jenis dan harganya. Bila hasil industri terlalu mahal tidak akan terbeli oleh masyarakat. Hal ini akan mengakibatkan industri sulit berkembang dan mutu hasil industri sulit ditingkatkan. Penduduk yang mempunyai pendapatan perkapita rendah juga mengakibatkan kemampuan menabung menjadi rendah. Bila kemampuan menabung rendah, pembentukan modal menjadi lambat, sehingga jalannya pembangunan menjadi tidak lancar.

6. Upaya Mengatasi Permasalahan Kependudukan

1. Upaya mengatasi masalah pertumbuhan penduduk yang besar dan cepat

Secara nasional pertumbuhan penduduk Indonesia masih relatif cepat, walaupun ada kecenderungan menurun. Antara tahun 1961 – 1971 pertumbuhan penduduk sebesar 2,1 % pertahun, tahun 1971 – 1980 sebesar 2,32% pertahun, tahun 1980 – 1990 sebesar 1,98% pertahun, dan periode 1990 – 2000 sebesar 1,6% pertahun. Penurunan pertumbuhan penduduk ini tentunya cukup menggembirakan, hal ini didukung oleh pelaksanaan program keluarga berencana di seluruh tanah air.

Keluarga berencana merupakan suatu usaha untuk mengatur jumlah anak dalam keluarga, demi kesejahteraan keluarga. Dalam program ini setiap keluarga dianjurkan mempunyai dua atau tiga anak saja atau merupakan keluarga kecil.

Dengan terbentuknya keluarga kecil diharapkan semua kebutuhan hidup anggota keluarga dapat terpenuhi sehingga terbentuklah keluarga sejahtera. Dari uraian di atas jelaslah bahwa Program Keluarga Berencana mempunyai dua tujuan pokok yaitu:

- 1) Menurunkan angka kelahiran agar pertambahan penduduk tidak melebihi kemampuan peningkatan produksi.
 - 2) Meningkatkan kesehatan ibu dan anak untuk mencapai keluarga sejahtera.
2. Upaya mengatasi masalah penyebaran penduduk yang tidak merata

Oleh karena dampak yang dirasakan cukup besar maka perlu ada upaya untuk meratakan penyebaran penduduk di tiap-tiap daerah. Upaya-upaya tersebut adalah:

- a) Pemerataan pembangunan.
- b) Penciptaan lapangan kerja di daerah-daerah yang jarang penduduknya dan daerah pedesaan.
- c) Pemberian penyuluhan terhadap masyarakat tentang pengelolaan lingkungan alamnya.

Untuk mengatasi persebaran penduduk yang tidak merata dilaksanakan program transmigrasi. Tujuan pelaksanaan transmigrasi yaitu:

- a) Meratakan persebaran penduduk di Indonesia.
 - b) Peningkatan taraf hidup transmigran.
 - c) Pengolahan sumber daya alam.
 - d) Pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia.
 - e) Menyediakan lapangan kerja bagi transmigran.
 - f) Meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa.
 - g) Meningkatkan pertahanan dan keamanan wilayah Indonesia.
3. Upaya mengatasi masalah rendahnya kualitas kesehatan
- Usaha-usaha pemerintah untuk meningkatkan kualitas kesehatan penduduk Indonesia yaitu:
- a) Melaksanakan program perbaikan gizi.

- b) Perbaikan lingkungan hidup dengan cara mengubah perilaku sehat penduduk, serta melengkapi sarana dan prasarana kesehatan.
 - c) Penambahan jumlah tenaga medis seperti dokter, bidan, dan perawat.
 - d) Pencegahan dan pemberantasan penyakit menular.
 - e) Pembangunan Puskesmas dan rumah sakit.
 - f) Pemberian penyuluhan kesehatan kepada masyarakat.
 - g) Penyediaan air bersih.
 - h) Pembentukan Posyandu (Pos Pelayanan Terpadu),
4. Upaya mengatasi masalah rendahnya kualitas pendidikan

7. Upaya mengatasi masalah rendahnya tingkat pendapatan penduduk

Masih rendahnya pendapatan perkapita penduduk Indonesia, terutama disebabkan oleh:

- a) Pendapatan/penghasilan negara masih rendah, walaupun Indonesia kaya sumber daya alam tetapi belum mampu diolah semua untuk peningkatan kesejahteraan penduduk.
- b) Jumlah penduduk yang besar dan pertambahan yang cukup tinggi setiap tahunnya.
- c) Tingkat teknologi penduduk masih rendah sehingga belum mampu mengolah semua sumber daya alam yang tersedia.

Oleh karena itu upaya menaikkan pendapatan perkapita, pemerintah melakukan usaha:

- a) Meningkatkan pengolahan dan pengelolaan sumber daya alam yang ada.
- b) Meningkatkan kemampuan bidang teknologi agar mampu mengolah sendiri sumber daya alam yang dimiliki bangsa Indonesia.
- c) Memperkecil pertambahan penduduk diantaranya dengan penggalakan program KB dan peningkatan pendidikan.
- d) Memperbanyak hasil produksi baik produksi pertanian, pertambangan, perindustrian, perdagangan maupun fasilitas jasa (pelayanan)
- e) Memperluas lapangan kerja agar jumlah pengangguran tiap tahun selalu berkurang.
- f) Penciptaan perangkat hukum yang menjamin tumbuh dan berkembangnya usaha/investasi, baik PMDN ataupun PMA.

- g) Optimalisasi peranan BUMN dalam kegiatan perekonomian, sehingga dapat lebih banyak menyerap tenaga kerja.
- h) Penyederhanaan birokrasi dalam perizinan usaha. Pembangunan/menyediakan fasilitas umum (jalan, telepon) sehingga dapat mendorong kegiatan ekonomi.

Faktor faktor yang menyebabkan terjadinya persebaran penduduk:

1. Kesuburan tanah, daerah atau wilayah yang ditempati banyak penduduk, karena dapat dijadikan sebagai lahan bercocok tanam dan sebaliknya.
2. Iklim, wilayah yang beriklim terlalu panas, terlalu dingin, dan terlalu basah biasanya tidak disenangi sebagai tempat tinggal
3. Topografi atau bentuk permukaan tanah pada umumnya masyarakat banyak bertempat tinggal di daerah datar
4. Sumber air
5. Perhubungan atau transportasi
6. Fasilitas dan juga pusat-pusat ekonomi, pemerintahan, dll.

Jumlah penduduk Indonesia menempati urutan keempat terbesar di dunia. Tingkat pertumbuhan penduduknya juga tinggi. Sebenarnya jumlah penduduk yang besar bukanlah suatu masalah, sebab apabila semua penduduknya memiliki kualitas SDM yang baik maka justru akan memberikan kontribusi kepada negara. Masalah kependudukan di Indonesia adalah sebagai berikut:

8. Program Kampung KB

Mendengar istilah “ Kampung ”, kesan yang muncul di pikiran kita pasti akan tertuju pada suatu tempat hunian dari sekumpulan orang atau keluarga dengan segala keterbelakangan, keterbatasan, tertinggal, kolot, kumuh, terpencil, dan beberapa sebutan lainnya yang terkait dengan kampung. Memang tidak dapat kita pungkiri, bahwa kampung sangat identik dengan istilah-istilah seperti itu, begitu juga halnya dengan istilah Kampung KB yang akhir-akhir ini menjadi icon yang cukup populer tidak hanya dikalangan para pengelola program Kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga (KKB-PK) dalam hal ini BkkbN, akan tetapi juga banyak diperbincangkan oleh lembaga-lembaga departemen ataupun non departemen mulai dari tingkat daerah sampai ketinggian

pusat. Memang, sejak Kampung KB ini dicanangkan oleh Bapak Presiden RI (Ir.Joko Widodo) pada bulan Januari 2016, bahwa Kampung KB ini banyak diperbincangkan oleh masyarakat mulai dari kalangan bawah, menengah sampai kepada masyarakat kalangan elit, dan bahkan tulisan-tulisan mengenai kampung KB banyak mengisi kolom-kolom pemberitaan di media massa (surat kabar, majalah, tabloid) dan bahkan menjadi pemberitaan yang cukup hangat dan populer di media-media elektronik. Lantas kenapa kampung KB ini dibentuk, ada beberapa hal yang melatar belakangnya, yaitu : (1) Program KB tidak lagi bergema dan terdengar gaungnya seperti pada era Orde Baru, (2) untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di tingkat kampung atau yang setara melalui program KKBPK serta pembangunan sector terkait dalam rangka mewujudkan keluarga kecil berkualitas. (3) penguatan program KKBPK yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh dan untuk masyarakat, (4) Mewujudkan cita-cita pembangunan Indonesia yang tertuang dalam Nawacita terutama agenda prioritas ke 3 yaitu “Memulai pembangunan dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan” serta Agenda Prioritas ke 5, yaitu “Meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia ”, (5) mengangkat dan menggairahkan kembali program KB guna menyongsong tercapainya bonus demografi yang diprediksi akan terjadi pada tahun 2010 – 2030 (www.bkkbn.go.id).

Secara umum, tujuan dibentuknya Kampung KB ini adalah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di tingkat kampung atau yang setara melalui program KKBPK serta pembangunan sector terkait lainnya dalam rangka mewujudkan keluarga kecil berkualitas. Sedangkan secara khusus, Kampung KB ini dibentuk selain untuk meningkatkan peran serta pemerintah, lembaga non pemerintah dan swasta dalam memfasilitasi, mendampingi dan membina masyarakat untuk menyelenggarakan program KKBPK dan pembangunan sector terkait, juga untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pembangunan berwawasan kependudukan. Syarat-syarat Pembentukan Kampung KB

Pada dasarnya ada tiga hal pokok yang dapat dijadikan bahan pertimbangan sebagai syarat dibentuknya Kampung KB dalam suatu wilayah,

yaitu : Pertama, tersedianya data kependudukan yang akurat. Kedua, dukungan dan komitmen Pemerintah Daerah. Ketiga, partisipasi aktif masyarakat

Kriteria Wilayah Kampung KB

9. Sasaran Kegiatan Kampung KB

Sasaran kegiatan yang merupakan subyek dan obyek dalam pelaksanaan kegiatan operasional pada Kampung KB selain keluarga. PUS, lansia, dan remaja juga keluarga yang memiliki balita, keluarga yang memiliki remaja dan keluarga yang memiliki lansia. Sedangkan sasaran sektoral disesuaikan dengan bidang tugas masing-masing yang pelaksananya adalah Kepala Desa/Lurah, Ketua RW, Ketua RT, PKB, Petugas lapangan sektor terkait, TP PKK, kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) dalam hal ini PPKBD dan Sub PPKBD, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokohagamat, tokoh pemuda serta kader pembangunan lainnya.

Undang-undang nomor 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga sebagai dasar pelaksanaan Program Kependudukan dan Keluarga Berencana menekan kewenangan kepada Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) untuk tidak memfokuskan hanya pada masalah Pengendalian Penduduk saja namun masalah Pembangunan Keluarga juga harus mendapatkan perhatian. Karena itu, dalam rangka penguatan program KKBPK tahun 2015-2019, BKKBN diharapkan dapat menyusun suatu kegiatan yang dapat memperkuat upaya pencapaian optimalisasi atau sasaran yang secara langsung bersentuhan dan memberikan manfaat kepada masyarakat. Sehubungan dengan itu, maka untuk menjawab tantangan tersebut digagaslah program Kampung KB. Melalui wadah Kampung KB ini nantinya diharapkan pelaksanaan program KKBPK dan program-program pembangunan lainnya dapat berjalan secara terpadu dan bersamaan. Hal ini sesuai dengan amanat yang tertuang dalam Agenda Prioritas Pembangunan terutama agenda prioritas ke 3 yaitu “ Memulai pembangunan dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan”. Oleh karena itu cukup beralasan apabila pembangunan kependudukan dimulai dari wilayah-wilayah pinggiran yaitu kampung, karena kampung merupakan cikal bakal terbentuknya desa, dan apabila pembangunan pada seluruh kampung maju, maka desapun akan maju,

apabila seluruh desa maju maka sudah barang tentu negarapun akan menjadi maju (www.bkkbn.go.id).

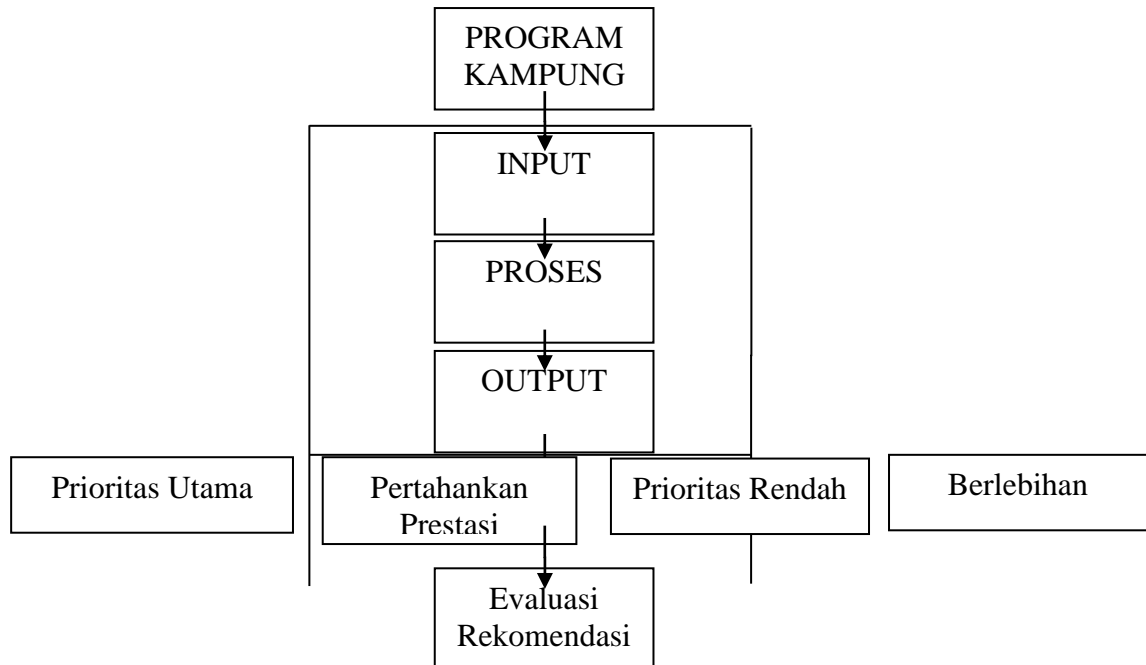
10. Kampung KB Sebagai Wahana Pemberdayaan Masyarakat

Walaupun pembentukan Kampung KB diamanatkan kepada BkkbN, akan tetapi pada prinsipnya Kampung KB merupakan perwujudan dari sinergi antara beberapa kementerian terkait dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah, mitra kerja, dan pemangku kepentingan, serta tidak ketinggalan partisipasi langsung masyarakat setempat. Oleh sebab itu Kampung KB ini diharapkan menjadi miniature atau gambaran(potret)dari sebuah desa yang didalamnya terdapat keterpaduan dari program pembangunan Kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga yang disinergikan dengan program pembangunan sector terkait yang dilaksanakan secara sistemik dan sistematis. Hal ini sesuai dengan definisi dari Kampung KB itu sendiri yaitu ”satuan wilayah setingkat RW, dusun, atau yang setara, yang memiliki kriteria tertentu, di mana terdapat keterpaduan Program KKBPK dan pembangunan sektor terkait yang dilaksanakan secara sistemik dan sistematis “.Jadi Kampung KB sebenarnya dirancang sebagai upaya membumikan, mengangkat kembali, merevitalisasi program KKBPK guna mendekatkan akses pelayanan kepada keluarga dan masyarakat dalam upaya mengaktualisasikan dan mengaflikasikan 8 (delapan) fungsi keluarga secara utuh dalam masyarakat.Dengan demikian kegiatanyang dilakukan pada Kampung KB tidak hanya identik dengan penggunaan dan pemasangan kontrasepsi, akan tetapi merupakan sebuah program pembangunanterpadu dan terintegrasi dengan berbagai program pembangunan lainnya, sehingga wadah Kampung KB ini dapat kita jadikan sebagai wahana pemberdayaan masyarakat melalui berbagai macam program yang mengarah pada upaya merubah sikap, prilaku dan cara berfikir (mindset) masyarakat kearah yang lebih baik, sehingga kampung yang tadinya tertinggal dan terbelakang dapat sejajar dengan kampung-kampung lainnya, masyarakat yang tadinya tidak memiliki kegiatan dapat bergabung dengan poktan-poktan yang ada, keluarga yang tadinya tidak memiliki usaha dapat bergabung menjadi anggota UPPKS yang ada.

2.2 Kerangka Pemikiran

Kerangka konseptual pada penelitian ini merupakan tinjauan teori dan tinjauan terdahulu yang mencerminkan keterkaitan antar variabel.

Adapun kerangka pemikiran ini di gambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran Implementasi

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif menggambarkan fenomena yang terjadi dan memberikan suatu kesimpulan yang dijadikan rekomendasi. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis implementasi Program Kampung KB dan optimalisasi pelaksanaan program KB.

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Batubara, Kabupaten Asahan dan Kabupaten Labuhan Batu Utara, dengan dengan waktu penelitian yang direncanakan mulai Maret sampai Juni 2018

3.3. Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional merupakan acuan dari landasan teoritis yang digunakan untuk melakukan penelitian dimana antara variabel yang satu dengan yang lainnya dapat dihubungkan sehingga penelitian dapat disesuaikan dengan data yang diinginkan. Untuk memudahkan pemahaman terhadap variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini maka perlu diberikan batasan operasional sebagai berikut :

\

Tabel 3.2 Operasionalisasi Variabel Implementasi Program Kampung KB

Variabel	Dimensi	Indikator	Skala
INPUT	1. Jumlah tenaga pengelola kampung	a. Sangat Penting b. Penting c. Kurang Penting d. Tidak Penting	Interval
	2. Jumlah Kepemilikan Sarana dan Prasarana	a. Sangat Penting b. Penting c. Kurang Penting d. Tidak Penting	Interval
	3. Jumlah Keterlibatan Pemerintah Daerah/Lintas Sektor/Mitra	a. Sangat Penting b. Penting c. Kurang Penting d. Tidak Penting	Interval
	4. Jumlah Sumber Dana	a. Sangat Penting b. Penting c. Kurang Penting d. Tidak Penting	Interval
PROSES	1. Frekuensi kegiatan seksi keagamaan	a. Sangat Penting b. Penting c. Kurang Penting d. Tidak Penting	Interval
	2. Frekuensi kegiatan seksi pendidikan	a. Sangat Penting b. Penting c. Kurang Penting d. Tidak Penting	Interval
	3. Frekuensi kegiatan seksi reproduksi	a. Sangat Penting b. Penting c. Kurang Penting d. Tidak Penting	Interval
	4. Frekuensi kegiatan seksi ekonomi	a. Sangat Penting b. Penting c. Kurang Penting d. Tidak Penting	Interval
	5. Frekuensi kegiatan seksi perlindungan	a. Sangat Penting b. Penting c. Kurang Penting d. Tidak Penting	Interval
	6. Frekuensi kegiatan kasih saying	a. Sangat Penting b. Penting c. Kurang Penting d. Tidak Penting	Interval
	7. Frekuensi kegiatan seksi sosial budaya	a. Sangat Penting b. Penting c. Kurang Penting d. Tidak Penting	Interval
	8. Frekuensi kegiatan seksi pembinaan lingkungan	a. Sangat Penting b. Penting c. Kurang Penting d. Tidak Penting	Interval
	9. Pertemuan evaluasi pelaksanaan rencana kerja POKJA dengan mitra	a. Sangat Penting b. Penting c. Kurang Penting d. Tidak Penting	Interval
	1. Jumlah Kesertaan ber-KB per	a. Sangat Penting b. Penting	Interval

OUTPUT	Mix Kontrasepsi	c. Kurang Penting d. Tidak Penting	
	2. Jumlah PUS yang tidak pakai KB	a. Sangat Penting b. Penting c. Kurang Penting d. Tidak Penting	Interval
	3. Jumlah BKB	a. Sangat Penting b. Penting c. Kurang Penting d. Tidak Penting	Interval
	4. Jumlah BKR	a. Sangat Penting b. Penting c. Kurang Penting d. Tidak Penting	Interval
	5 Jumlah BKL	a. Sangat Penting b. Penting c. Kurang Penting d. Tidak Penting	Interval
	6 Cakupan Kesertaan Keluarga dalam Poktan	a. Sangat Penting b. Penting c. Kurang Penting d. tidak Penting	Interval
	7. Berkembangnya budi pekerti, tata krama dan seni budaya	a. Sangat Penting b. Penting c. Kurang Penting d. tidak Penting	Interval
	8. Tertatanya lingkungan yang serasi selaras dan seimbang antara perilaku dan lingkungan	a. Sangat Penting b. Penting c. Kurang Penting d. tidak Penting	Interval

Tabel 3.3 Operasionalisasi Variabel Optimalisasi Program Kampung KB

Variabel	Dimensi	Indikator	Skala
INPUT	2. Jumlah tenaga pengelola kampung	a. Sangat memadai b. Memadai c. Kurang Memadai d. Tidak Memadai	Interval
	3. Jumlah Kepemilikan Sarana dan Prasarana	a. Sangat memadai b. Memadai c. Kurang Memadai d. Tidak Memadai	Interval
	4. Jumlah Keterlibatan Pemerintah Daerah/Lintas Sektor/Mitra	a. Sangat memadai b. Memadai c. Kurang Memadai d. Tidak Memadai	Interval
	5. Jumlah Sumber Dana	a. Sangat memadai b. Memadai c. Kurang Memadai d. Tidak Memadai	Interval
	10. Frekuensi kegiatan seksi keagamaan	a. Sangat memadai b. Memadai c. Kurang Memadai d. Tidak Memadai	Interval

PROSES	11. Frekuensi kegiatan seksi pendidikan	a. Sangat memadai b. Memadai c. Kurang Memadai d. Tidak Memadai	Interval
	12. Frekuensi kegiatan seksi reproduksi	a. Sangat memadai b. Memadai c. Kurang Memadai d. Tidak Memadai	Interval
	13. Frekuensi kegiatan seksi ekonomi	a. Sangat memadai b. Memadai c. Kurang Memadai d. Tidak Memadai	Interval
	14. Frekuensi kegiatan seksi perlindungan	a. Sangat memadai b. Memadai c. Kurang Memadai d. Tidak Memadai	Interval
	15. Frekuensi kegiatan kasih sayang	a. Sangat memadai b. Memadai c. Kurang Memadai d. Tidak Memadai	Interval
	16. Frekuensi kegiatan seksi sosial budaya	a. Sangat memadai b. Memadai c. Kurang Memadai d. Tidak Memadai	Interval
	17. Frekuensi kegiatan seksi pembinaan lingkungan	a. Sangat memadai b. Memadai c. Kurang Memadai d. Tidak Memadai	Interval
	18. Pertemuan evaluasi pelaksanaan rencana kerja POKJA dengan mitra	a. Sangat memadai b. Memadai c. Kurang Memadai d. Tidak Memadai	Interval
OUTPUT	1. Jumlah Kesertaan ber-KB per Mix Kontrasepsi	a. Sangat memadai b. Memadai c. Kurang Memadai d. Tidak Memadai	Interval
	2. Jumlah PUS yang tidak pakai KB	a. Sangat memadai b. Memadai c. Kurang Memadai d. Tidak Memadai	Interval
	3. Jumlah BKB	a. Sangat memadai b. Memadai c. Kurang Memadai d. Tidak Memadai	Interval
	4. Jumlah BKR	a. Sangat memadai b. Memadai c. Kurang Memadai d. Tidak Memadai	Interval
	5. Jumlah BKL	a. Sangat memadai b. Memadai c. Kurang Memadai d. Tidak Memadai	Interval
	6. Cakupan Kesertaan Keluarga dalam Poktan	a. Sangat memadai b. Memadai c. Kurang Memadai d. Tidak Memadai	Interval
	9. Berkembangnya budi pekerti, tata krama dan seni	a. Sangat memadai	

	budaya	b. Memadai c. Kurang Memadai d. Tidak Memadai	
	10. Tertatanya lingkungan yang serasi selaras dan seimbang antara perilaku dan lingkungan	a. Sangat memadai b. Memadai c. Kurang Memadai d. Tidak Memadai	

3.4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data primer dengan observasi, wawancara dan penyebaran angket langsung kepada responden yang dijadikan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah kampung KB yang ada di 3 Kabupaten di Pantai Timur yang juga dijadikan sebagai sampel sebanyak 22 Kampung KB.

Tabel 3.4 Populasi dan Sampel

No	Kabupaten	Kampung KB	Kampung KB	Sampel
1	Batubara	5	Desa Adul Rahman, Desa Sei Mujur, Desa Bagan, Desa Pahlawan, Desa Nanas Siam	40
2	Asahan	12	Desa Sei Kepayang Kanan, Desa Sei Tualang Pandau, Desa Sei Sembilang, Desa Silau Baru, Desa Silau Maraja, Desa Bagan Asahan Pekan, Desa Mekar Tanjung, Desa Ledong Timur, Desa Air Joman Baru, Desa Dadimulio, Desa Suka Jadi, Desa Taman Sari	94
3	Labura	5	Desa Ujung Padang, Desa Cinta Damai, Desa Kuala Beringin Kecamatan Aek Natas, Desa Hasang, Kec Kuala Selatan	40
		22		174

Sumber : Bkkbn Sumut

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa jumlah populasi dalam penelitian ini sebanyak 22 Kampung KB. Responden dalam penelitian ini adalah masyarakat yang langsung terkait dengan program Kampung KB dan petugas pelaksana Kampung KB. Jumlah sampel dalam penelitian ini ditetapkan berdasarkan kriteria sebanyak 29 untuk masyarakat dan 29 untuk petugas kampung KB di setiap Kabupaten. Jumlah sampel seluruhnya sebanyak $58 \times 3 = 174$ responden (87 masyarakat dan 87 petugas Kampung KB). Penentuan jumlah sampel berdasarkan purposive, yaitu petugas KB yang langsung ikut aktivitas kegiatan Kampung KB dan masyarakat yang terlibat dalam aktivitas Kampung KB.

3.5. Metode Analisis Data

Analisis deskriptif untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi (Rusiadi,2013). Untuk mendukung analisis deskriptif digunakan model Optimalisasi Program Kampung KB Menggunakan Grafik Kuadran. Tingkat optimalisasi program kampung KB adalah hasil perbandingan skor kinerja program kampung KB dan skor optimalisasi program kampung KB.

BAB IV

DISKRIPSI DATA DAN PEMBAHASAN

4.1 Diskripsi Data

4.1.1. Penyajian Data Hasil Kuesioner

Dalam pembahasan ini penulis akan merujuk pada sistem penyajian data yang diperoleh dari Hasil jawaban responden, dimana melalui metode pengumpulan data berupa quessioner dengan menyebarkan angket pertanyaan kepada masyarakat dan petugas kampung KB. Populasi yaitu 40 Kampung KB. Responden dalam penelitian ini adalah masyarakat yang langsung terkait dengan program Kampung KB dan petugas pelaksana Kampung KB. Jumlah sampel dalam penelitian ini ditetapkan berdasarkan kriteria sebanyak 29 untuk masyarakat dan 29 untuk petuugas kampung KB di setiap Kabupaten. Jumlah sampel seluruhnya sebanyak $58 \times 3 = 174$ responden (87 masyarakat dan 87 petugas Kampung KB).

Adapun quessioner yang penulis harapkan untuk dijawab oleh para responden adalah terdiri dari 21 pertanyaan yang terdiri atas :

1. Indikator Input, sebanyak 4 pertanyaan
2. Indikator Proses, sebanyak 9 pertanyaan
3. Indikator Hasil , sebanyak 8 pertanyaan

Dalam membantu menginterpretasikan hasil data hasil kuesioner ke dalam tabulasi data, digunakan skala likert. Menurut Sugiyono (2010:86) “Skala likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan prsepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial”. Dengan skala likert, maka variabel yang diukur dijabarkan menjadi indikator variabel. Kemudian indikator tersebut dijadikan sebagai titik tolak untuk mnyusun item-item yang dapat berupa pernyataan atau pertanyaan. Jawaban dari item instrumen menggunakan skala likert yang digunakan adalah :

1. Sangat Penting /Memadai
2. Penting Memadai
3. Kurang Penting /Memadai

4. Tidak Penting /Memadai

Untuk keperluan analisis kuantitatif, maka jawaban itu dapat diberi skor, misalnya :

1. Sangat Penting /Memadai diberi skor 4
2. Penting /Memadai diberi skor 3
3. Kurang Penting /Memadai diberi skor 2
4. Tidak Penting /Memadai diberi skor 1

Keadaan responden masyarakat dan petugas dapat dijabarkan sebagai berikut :

Tabel 4.1 Jumlah Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
Masyarakat	Laki-Laki	29	33,33
	Perempuan	58	66,67
		87	50%
Petugas	Laki-Laki	35	40,23
	Perempuan	52	59,77
		87	50%
	Jumlah	174	100%

Sumber : Hasil jawaban responden 2018

Berikut dijelaskan gambaran umum responden atas hasil angket dengan jawaban yang diberikan adalah sebagai berikut :

Tabel 4.2 Jumlah Responden Berdasarkan Usia

No	Usia	Jumlah	Persentase
Masyarakat	>25	8	9,20
	26-30	19	21,84
	31-35	36	41,38
	>35	24	27,59
		87	50%
Petugas	>25	8	9,20
	26-30	19	21,84
	31-35	36	41,38

	>35	24	27,59
		87	50%
	Jumlah	174	100%

Sumber : Hasil jawaban responden 2018

Sebagian besar responden masyarakat dan petugas memiliki usia antara 31 sd 35 tahun. Usia tersebut menggambarkan banyaknya aktivitas masyarakat dalam keterlibatan di kampung KB.

4.1.2. Gambaran Umum Kampung KB di Kabupaten Labuhan Batu Utara

Dari 8 desa kampung KB peneliti mengambil sample data dari 4 desa kampung KB, yaitu Desa Ujung Padang, Desa Cinta Damai, Desa Kuala Beringin Kecamatan Aek Natas, Desa Hasang, Kec Kuala Selatan dijumpai beberapa fenomena antara lain: Belum memiliki kantor kesetariatan dan masih menumpang tempat di balai desa dalam setiap penyuluhan kegiatan berhubungan dengan penyuluh KB. Adapun kendala yang ada dalam implementasi kampung KB di desa kab labura:

- Di setiap desa Masih merancang pokja seksi-seksi Keterlibatan dinas-dinas terkait berhubungan dengan kampung KB, dinas pendidikan dan dinas kesehatan berhubungan keterkaitan saksi pik R dan penyuluhan alat kontrasepsi.
- Belum adanya sumber anggaran dana dalam perencanaan kegiatan sehubungan kampung KB dari DPPKB (dinas pengendalian penduduk dan KB).
- Masih kurangnya sinergitas ke dinas dinas terkait untuk memberikan penyuluhan dengan program yang ada di kampung KB khususnya diluar dari urusan kesehatan
- Keterbatasan jumlah SDM PL/penyuluh lapangan KB.

Dari kesemuanya dapat disimpulkan masih belum maksimalnya program kampung KB dilaksanakan oleh perangkat dan masyarakat kampung KB di kabupaten Labura. Yang menjadi sumber informasi, Desa Ujung Padang, Desa Cinta Damai, Desa Kuala Beringin Kecamatan Aek Natas Desa Hasang, Kec Kuala Selatan.

4.1.3. Gambaran Umum Kampung KB di Kabupaten Batubara

Bulan April dilakukan survey lapangan dalam tujuan pengambilan sample sederhana melalui penyebaran kuesioner yang di peruntukan kepada para penyuluh lapangan KB dan juga masyarakat serta kader KB di 5 desa kampung KB dari 7 antara lain Desa Adul Rahman, Desa Sei Mujur, Desa Bagan, Desa Pahlawan, Desa Nanas Siam. Dalam penyebaran kuesioner para tenaga ahli membantu menyampaikan maksud dari pertanyaan yang akan di jawab secara langsung oleh para PNS dan kader penyuluh KB. Total kuesioner yang telah disebarakan dan telah diisi lebih kurang 174 sample dan juga dilakukan wawancara langsung kepada masyarakat yang ada di 5 desa di tiga Kabupaten selaku objek dalam penerapan program kampung KB.

Pada masyarakat desa di 5 kampung KB yang ada di tiga Kabupaten selain proses penyebaran angket tim ahli juga melakukan wawancara terkait proses pelaksanaan program kegiatan yang ada di desa masing – masing desa kampung KB dan juga tentang manfaat apa yang dirasakan setelah adanya program kampung KB. Dalam proses wawancara kepada masyarakat kita memilih secara purposive dan dilakukan di sekitar pemukiman masyarakat dan juga di balai desa. Dimana dalam proses wawancara tidak banyak masyarakat yang mengetahui program yang ada setelah desa mereka di tetapkan sebagai desa kampung KB, serta keunggulan dan manfaat apa yang nantinya dirasakan mereka setelah Desa mereka di jadikan predikat Kampung KB.

4.1.4. Gambaran Umum Kampung KB di Kabupaten Asahan

Kabupaten Asahan merupakan salah satu kabupaten yang terletak di pesisir pantai timur. Terdapat 25 desa kampung KB di Kabupaten Asahan peneliti mengambil sample data dari 12 desa kampung KB, terdiri atas :

1. Desa Sei Kepayang Kanan, Kecamatan Sei Kepayang
2. Desa Sei Tualang Pandau, Kecamatan Sei Kepayang Barat
3. Desa Sei Sembilang, Kecamatan Sei Kepayang Timur
4. Desa Silau Baru, Kecamatan Silau Laut
5. Desa Silau Maraja, Kecamatan Setia Janji
6. Desa Bagan Asahan Pekan, Kecamatan Tanjung Balai

7. Desa Mekar Tanjung, Kecamatan Teluk Dalam
8. Desa Ledong Timur, Kecamatan Aek Ledong
9. Desa Air Joman Baru, Kecamatan Air Joman
10. Desa Dadimulio, Kecamatan Kota Kisaran Barat
11. Desa Suka Jadi, Kecamatan Meranti
12. Desa Taman Sari, Kecamatan Pulau Bandring

Fenomena secara keseluruhan sama, yaitu dijumpai beberapa fenomena antara lain : Belum memiliki kantor kesetariatan.dan masih menumpang tempat di balai desa dalam setiap penyuluhan kegiatan berhubungan dengan penyuluh KB. Adapun kendala yang ada dalam implementasi kampung KB di desa Kabupaten Asahan:

- Di setiap desa Masih merancang pokja seksi seksi Keterlibatan dinas-dinas terkait berhubungan dengan kampung KB, dinas pendidikan dan dinas kesehatan berhubungan keterkaitan saksi pik R dan penyuluhan alat kontrasepsi.
- Belum adanya sumber anggaran dana dalam perencanaan kegiatan sehubungan kampung KB dari DPPKB (dinas pengendalian penduduk dan KB).
- Masih kurangnya sinergitas ke dinas dinas terkait untuk memberikan penyuluhan dengan program yang ada di kampung KB khususnya diluar dari urusan kesehatan
- Keterbatasan jumlah SDM PL/penyuluh lapangan KB.

Dari kesemuanya dapat disimpulkan masih belum maksimalnya program kampung KB dilaksanakan oleh perangkat dan masyarakat kampung KB di Kabupaten Asahan.

4.1.5. Proses Studi Banding di CIREBON

Pada saat kunjungan di kota Cirebon kita di sambut dengan ramah oleh skpd dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kota Cirebon, dimana kita berkunjung di 2 kampung KB dimana letaknya saling berdekatan satu lokasi berada di kota cerebon tepatnya di kelurahan, dan yang satu lagi berada di kabupaten Cirebon. Kampung KB yang berada di kota cirebon tepatnya RW 17

kelurahan pegambiran kecamatan Lemah Wungkuk dimana mereka menamakan kelompok UPPKS Bougenvile.

Dalam proses kunjungan ke Cirebon **kita** melakukan interaksi dengan kader dan juga masyarakat yang ada di kelurahan pegambiran. Kunjungan tersebut memberikan banyak gambaran kepada peneliti tentang proses serta manfaat dari kegiatan yang telah dilakukan masyarakatnya. Dimana diantara delapan fungsi keluarga yang ada dalam proses penerapan program kampung KB hampir mendekati 100 % telah mereka lakukan, dalam hal ini kita dapat melihat dan berinteraksi langsung dengan masyarakat dan juga para kader penggagas program pembinaan yang ada di kelurahan pegambiran. Dalam perkembangannya dapat kami katakan bahwa masyarakat telah merasakan ada perubahan yang terjadi di masyarakatnya khususnya dari perilaku remajanya, dimana pada masa sebelum di tetapkannya kelurahan tersebut menjadi kampung KB sering terjadi tawuran remaja antar RW di kelurahan tersebut, tetapi setelah adanya kampung KB dan dibentuknya PIK-R banyak kegiatan yang diperuntukan untuk remaja seperti kegiatan perlombaan futsal dan juga kegiatan group music kasidah. Hampir keseluruhan program yang ada dalam 8 fungsi keluarga baik itu fungsi keluarga lansia serta fungsi keluarga balita sudah memiliki struktur pengurus pada masing masing program.

Kampung KB yang kedua yang dikunjungi adalah desa martasinga yang berada di kabupaten Cirebon tepatnya di kecamatan gunung jati. Tidak banyak perbedaan yang terdapat di kampung KB martasinga dengan kampung KB yang ada di kelurahan pegambiran, hanya berbeda letak geografisnya dimana satu di daerah pinggiran rel di daerah perkotaan dan satu lagi berada di daerah pesisir atau penggir laut. Kunjungan ke desa martasinga peran kader penyuluhnya sangat berperan aktif dalam memberikan informasi dan penyuluhan kepada warganya. Dari 8 fungsi keluarga yang ada dalam program kampung KB sudah memiliki struktur pengurus. Dimana dalam pengelolaannya memakai system keterbukaan dalam hal akses informasi mengenai perkembangan keseluruhan program dan juga tentang kondisi masyarakat desanya baik dari segi tingkat pendidikan, jumlah angka kelahiran bayi, jumlah kepesertaan KB.

4.2. Pembahasan

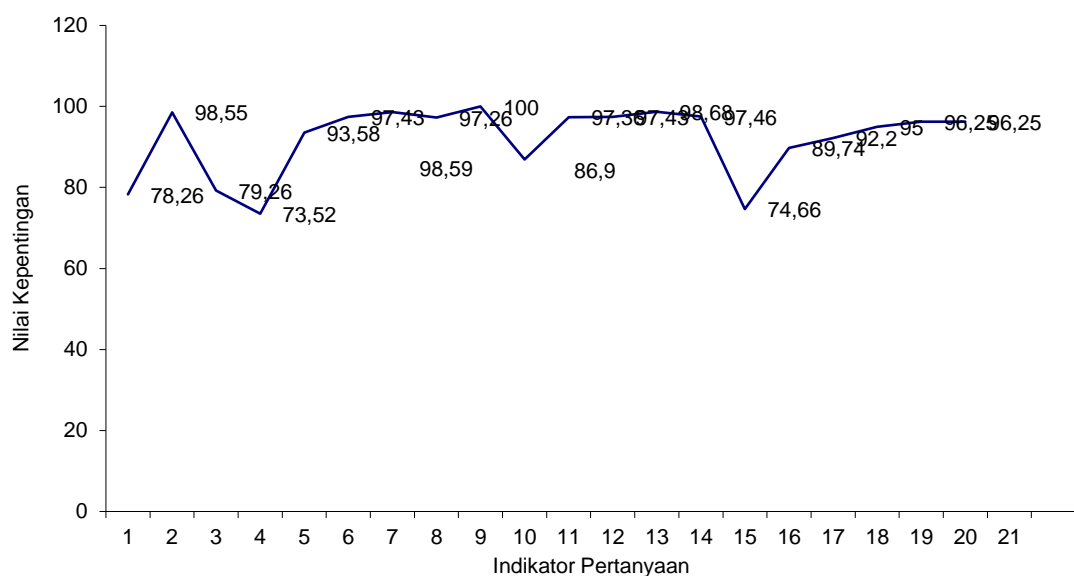
4.2.1. Pembahasan Kabupaten Labura

Pembahasan dilakukan berdasarkan hasil kajian dari dua sumber yaitu dari hasil jawaban responden atas angket dan dari hasil wawancara yang berasal dari petugas kampung KB dan pejabat yang terkait dengan kegiatan Kampung KB seperti Kepala Desa, camat dan dinas terkait. Berdasarkan hasil analisa atas setiap butir pernyataan, baik untuk kepentingan maupun untuk penilaian kinerja, kemudian dimasukkan ke dalam tabel kesimpulan atas setiap butir pertanyaan tersebut :

Tabel 4.129 Tabulasi Nilai Bobot dan Nilai Kesesuaian

No	Indikator Pertanyaan	Bobot		Nilai Kesesuaian
		masyarakat	petugas	
	INPUT			
1	Jumlah tenaga pengelola kampung di Kampung KB	92	72	78,26%
2	Jumlah Kepemilikan Sarana dan Prasarana di Kampung KB	68	69	98,55%,
3	Jumlah Keterlibatan Pemerintah Daerah/Lintas Sektor/Mitra di Kampung KB	82	65	79,26%
4	Jumlah Dana di Kampung KB	68	50	73,52 %
	PROSES			
1	Frekuensi kegiatan seksi keagamaan di Kampung KB	76	78	93,58,%
2	Frekuensi kegiatan seksi pendidikan di Kampung KB	76	78	97,43%
3	Frekuensi kegiatan seksi reproduksi di Kampung KB	70	71	98.59%
4	Frekuensi kegiatan seksi ekonomi di Kampung KB	73	71	97,26%
5	Frekuensi kegiatan seksi perlindungan di Kampung KB	75	75	100%
6	Frekuensi kegiatan kasih sayang di Kampung KB	84	73	86,90%
7	Frekuensi kegiatan seksi sosial budaya di Kampung KB	76	74	97,36%
8	Frekuensi kegiatan seksi pembinaan lingkungan di Kampung KB	78	76	97,43 %,
9	Pertemuan evaluasi pelaksanaan rencana kerja POKJA dengan mitra di Kampung KB	76	75	98,68 %

	OUTPUT			
1	Jumlah Kesertaan ber-KB per Mix Kontrasepsi di Kampung KB	79	77	97,46 %
2	Jumlah PUS yang tidak pakai KB di Kampung KB	56	75	74,66 %
3	Jumlah BKB di Kampung KB	78	70	89,74 %
4	Jumlah BKR di Kampung KB	77	71	92,20 %
5	Bapak/Ibu puas terhadap Jumlah BKL di Kampung KB	76	80	95 %,
6	Cakupan Kesertaan Keluarga dalam Poktan di Kampung KB	80	79	98,75 %
7	Semakin berkembangnya budi pekerti, tata krama dan seni budaya baik di keluarga maupun masyarakat sekampung	80	77	96,25 %
8	Semakin tertatanya lingkungan yang serasi selaras dan seimbang antara perilaku dan lingkungan	80	77	96,25 %



Gambar-4.1. Grafik nilai kesesuaian antara harapan masyarakat dan penilaian petugas

Pada gambar diatas dapat diketahui perkembangan tingkat kesesuaian antara harapan masyarakat dan penilaian petugas kampung KB tersebut. Pada gambar tersebut diketahui tingkat kesesuaian pada umumnya cenderung

mengalami fluktuasi, yaitu kenaikan dan penurunan pada setiap indikator yang berbeda.

Pada pertanyaan pertama tingkat kesesuaian sebesar 77,11% kemudian mengalami penurunan pada pertanyaan nomor 2 sebesar 68,56%, kemudian pertanyaan nomor 3 mengalami peningkatan menjadi 81,19%, dan seterusnya setiap pertanyaan mengalami penurunan dan kenaikan pada pertanyaan berikutnya.

Adapun rumus yang digunakan adalah :

$$T_{ki} = \frac{X_i}{Y_i} \times 100\% \quad (\text{Supranto, 2007:241})$$

Dimana : T_{ki} = Tingkat kesesuaian responden

X_i = Skor penilaian petugas

Y_i = Skor penilaian kepentingan masyarakat

Selanjutnya sumbu mendatar (X) akan diisi oleh skor tingkat petugas, sedangkan sumbu tegak (Y) akan diisi oleh skor tingkat kepentingan masyarakat. Dalam penyederhanaan rumus, maka untuk setiap faktor yang mempengaruhi pelaksanaan program Kampung KB dengan :

$$\bar{X} = \frac{X_i}{n}$$

$$\bar{Y} = \frac{Y_i}{n}$$

Di mana : \bar{X} = Skor rata-rata tingkat pelaksanaan petugas

\bar{Y} = Skor rata-rata tingkat kepentingan masyarakat

N = Jumlah responden

$$\bar{X} = \frac{92}{29}$$

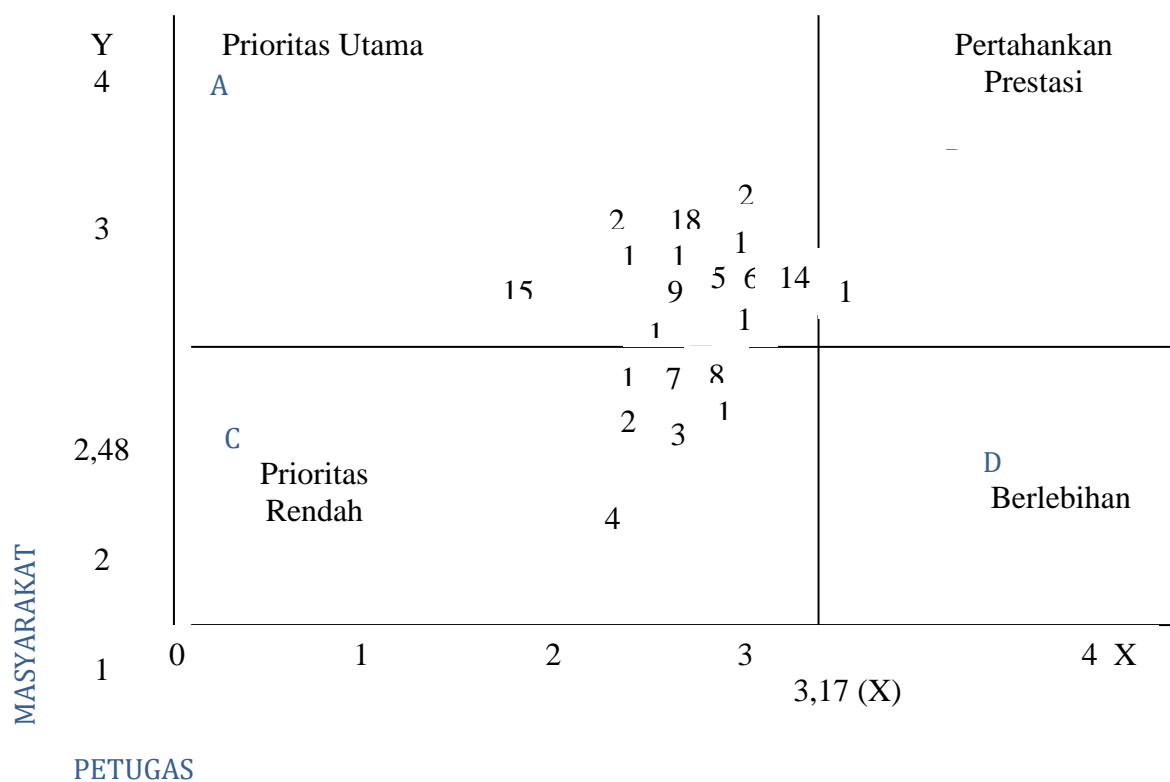
$$\bar{Y} = \frac{72}{29}$$

$$X = 3,17$$

$$Y = 2,48$$

Tabel 4.130 Tabulasi Nilai Bobot dan Nilai Kesesuaian Program Kampung KB

No	Indikator Pertanyaan	Bobot		X	Y
		masyarakat	petugas		
	INPUT				
1	Jumlah tenaga pengelola kampung di Kampung KB	92	72	3,17	2,48
2	Jumlah Kepemilikan Sarana dan Prasarana di Kampung KB	68	69	2,34	2,38
3	Jumlah Keterlibatan Pemerintah Daerah/Lintas Sektor/Mitra di Kampung KB	82	65	2,83	2,24
4	Jumlah Dana di Kampung KB	68	50	2,34	1,72
	PROSES				
5	Frekuensi kegiatan seksi keagamaan di Kampung KB	76	78	2,62	2,69
6	Frekuensi kegiatan seksi pendidikan di Kampung KB	76	78	2,62	2,69
7	Frekuensi kegiatan seksi reproduksi di Kampung KB	70	71	2,41	2,45
8	Frekuensi kegiatan seksi ekonomi di Kampung KB	73	71	2,52	2,45
9	Frekuensi kegiatan seksi perlindungan di Kampung KB	75	75	2,59	2,59
10	Frekuensi kegiatan kasih sayang di Kampung KB	84	73	2,90	2,52
11	Frekuensi kegiatan seksi sosial budaya di Kampung KB	76	74	2,62	2,55
12	Frekuensi kegiatan seksi pembinaan lingkungan di Kampung KB	78	76	2,69	2,62
13	Pertemuan evaluasi pelaksanaan rencana kerja POKJA dengan mitra di Kampung KB	76	75	2,62	2,59
	OUTPUT				
14	Jumlah Kesertaan ber-KB per Mix Kontrasepsi di Kampung KB	79	77	2,72	2,66
15	Jumlah PUS yang tidak pakai KB di Kampung KB	56	75	1,93	2,59
16	Jumlah BKB di Kampung KB	78	70	2,69	2,41
17	Jumlah BKR di Kampung KB	77	71	2,66	2,45
18	Bapak/Tbu puas terhadap Jumlah BKL di Kampung KB	76	80	2,62	2,76
19	Cakupan Kesertaan Keluarga dalam Poktan di Kampung KB	80	79	2,76	2,72
20	Semakin berkembangnya budi pekerti, tata krama dan seni budaya baik di keluarga maupun masyarakat sekampung	80	77	2,76	2,66
21	Semakin tertatanya lingkungan yang serasi selaras dan seimbang antara perilaku dan lingkungan	80	77	2,76	2,66
	Total			110,34	105,72
	Rata2			2,51	2,40



Gambar-4.2 Kartesian Kesesuaian Implementasi Program Kampung KB

Pada grafik diatas menggambarkan hasil pengukuran unsur-unsur program kampung KB berdasarkan tingkat kepentingan dan kinerjanya yang memungkinkan pihak pemerintah daerah untuk dapat menitikberatkan usaha-usaha perbaikan untuk hal-hal atau atribut yang benar-benar dianggap penting sesuai titik-titik pada diagraf kartesian yang sebelumnya perlu dihiotung terlebih dahulu nilai rataa-rata.

Pada grafik diatas dapat dilihat bahwa letak dari unsur-unsur pelaksanaan faktor-faktor atau atribut yang mempengaruhi evaluasi pelaksanaan kampung KB yang terbagi menjadi empat bagian. Adapun interprestasi dari diagram kartesian tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Kuadran A : Perioritas Utama

Menunjukkan faktor-faktor atau atribut yang mempengaruhi optimalisasi implementasi program Kampung KB berada dalam kuadran ini dan penanganannya perlu diprioritaskan, karena keberadaan faktor-faktor inilah yang dinilai sangat penting oleh masyarakat dan efektivitas kinerja petugas, sedangkan tingkat pelaksanaannya masih belum memuaskan.

Faktor-faktor yang termasuk dalam kuadran ini adalah :

- Frekuensi kegiatan seksi keagamaan di Kampung KB (5)
- Frekuensi kegiatan seksi pendidikan di Kampung KB (6)
- Frekuensi kegiatan seksi perlindungan di Kampung KB (9)
- Frekuensi kegiatan seksi perlindungan di Kampung KB (10)
- Frekuensi kegiatan seksi sosial budaya di Kampung KB (11)
- Frekuensi kegiatan seksi pembinaan lingkungan di Kampung KB (12)
- Pertemuan evaluasi pelaksanaan rencana kerja POKJA dengan mitra di Kampung KB (13)
- Jumlah Kesertaan ber-KB per Mix Kontrasepsi di Kampung KB (14)
- Jumlah PUS yang tidak pakai KB di Kampung KB (15)
- Bapak/Ibu puas terhadap Jumlah BKL di Kampung KB (18)
- Cakupan Kesertaan Keluarga dalam Poktan di Kampung KB (19)
- Semakin berkembangnya budi pekerti, tata krama dan seni budaya baik di keluarga maupun masyarakat sekampung (20)
- Semakin tertatanya lingkungan yang serasi selaras dan seimbang antara perilaku dan lingkungan (21)

2. Kuadran B : Pertahankan Prestasi

Menunjukkan faktor-faktor yang mempengaruhi optimalisasi implementasi program Kampung KB. Kuadran ini perlu dipertahankan, karena pada umumnya tingkat pelaksanaan telah sesuai dengan kepentingan dan harapan kedua belah pihak, sehingga dapat mencapai optimalisasi maksimal.

Faktor-faktor yang termasuk dalam kuadran B ini adalah :

- Jumlah tenaga pengelola kampung di Kampung KB (1)

3. Kuadran C : Prioritas Rendah

Menunjukkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi optimalisasi implementasi program Kampung KB berada dalam kuadran ini dinilai masih dianggap kurang penting bagi masyarakat dan petugas, sedangkan kualitas pelaksanaannya biasa atau cukup saja.

Adapun yang termasuk dalam kuadran C ini adalah :

- Jumlah Kepemilikan Sarana dan Prasarana di Kampung KB (2)

- Jumlah Keterlibatan Pemerintah Daerah/Lintas Sektor/Mitra di Kampung KB (4)
- Frekuensi kegiatan seksi reproduksi di Kampung KB (7)
- Frekuensi kegiatan seksi ekonomi di Kampung KB (8)
- Jumlah BKB di Kampung KB (16)
- Jumlah BKR di Kampung KB (17)

4. Kuadran D : Berlebihan

Menunjukkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dalam optimalisasi program Kampung KB berada dalam kuadran ini dinilai berlebihan dalam pelaksanaannya, hal ini terutama disebabkan karena masyarakat dan petugas menganggap tidak terlalu penting terhadap adanya faktor tersebut, akan tetapi pelaksanaannya dilakukan dengan baik sekali oleh petugas, sehingga sangat memuaskan, akan tetapi menjadi lebih mahal. Namun hasil kajian tidak ada yang masuk dalam prioritas ini. Artinya pemerintah tidak melakukan program yang berlebihan di kampung KB.

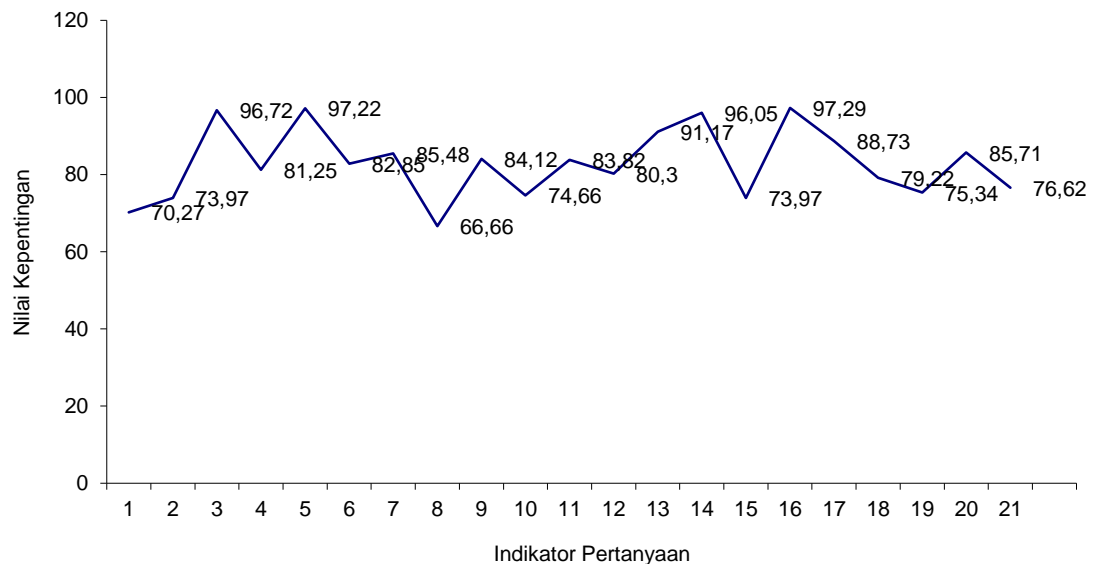
4.2.2. Pembahasan Kabupaten Batubara

Dari hasil analisa atas setiap butir pernyataan, baik untuk kepentingan maupun untuk penilaian kinerja, kemudian dimasukkan ke dalam tabel kesimpulan atas setiap butir pertanyaan tersebut :

Tabel 4.131 Tabulasi Nilai Bobot dan Nilai Kesesuaian

No	Indikator Pertanyaan	Bobot		Nilai Kesesuaian
		Masyarakat	Petugas	
	INPUT			
1	Jumlah tenaga pengelola kampung di Kampung KB sudah	52	74	70,27%
2	Jumlah Kepemilikan Sarana dan Prasarana di Kampung KB	54	73	73,97%
3	Apakah Jumlah Keterlibatan Pemerintah Daerah/Lintas Sektor/Mitra di Kampung KB memadai	59	61	96,72%
4	Jumlah Dana di Kampung KB sudah	52	46	81,25%
	PROSES			
1	Frekuensi kegiatan seksi keagamaan di Kampung KB	70	72	97,22%
2	Frekuensi kegiatan seksi pendidikan di Kampung KB	58	70	82,85%
3	Frekuensi kegiatan seksi reproduksi di Kampung KB	53	62	85,48%
4	Frekuensi kegiata seksi ekonomi di Kampung KB	48	72	66,66%
5	Frekuensi kegiatan seksi perlindungan di Kampung KB	53	63	84,12%
6	Frekuensi kegiatan kasih sayang di Kampung KB	56	75	74,66%
7	Frekuensi kegiatan seksi sosial budaya di Kampung KB	57	68	83,82%

8	Frekuensi kegiatan seksi pembinaan lingkungan di Kampung KB	53	66	80,30%
9	Pertemuan evaluasi pelaksanaan rencana kerja POKJA dengan mitra di Kampung KB	62	68	91,17%
	OUTPUT			
1	Jumlah Kesertaan ber-KB per Mix Kontrasepsi di Kampung KB	73	76	96,05%
2	Jumlah PUS yang tidak pakai KB di Kampung KB	54	73	73,97%
3	Jumlah BKB di Kampung KB	72	74	97,29%
4	Jumlah BKR di Kampung KB	63	71	88,73%
5	Bapak/Ibu puas terhadap Jumlah BKL di Kampung KB	61	77	79,22%
6	Cakupan Kesertaan Keluarga dalam Poktan di Kampung KB	55	73	75,34%
7	Semakin berkembangnya budi pekerti, tata krama dan seni budaya baik di keluarga maupun masyarakat sekampung	66	77	85,71%
8	Semakin tertatanya lingkungan yang serasi selaras dan seimbang antara perilaku dan lingkungan	59	77	76,62%
	Total	52	74	70,27%
	Rata2	54	73	73,97%



Gambar 4.3. Grafik nilai kesesuaian antara kepentingan masyarakat dari kinerja petugas.

Pada gambar diatas dapat diketahui perkembangan tingkat kesesuaian antara penilaian masyarakat yang diberikan dan penilaian petugas kampung KB. Pada gambar tersebut diketahui tingkat kesesuaian pada umumnya cenderung mengalami fluktuasi, yaitu kenaikan dan penurunan pada setiap pertanyaan yang berbeda.

Pada pertanyaan pertama tingkat kesesuaian sebesar 77,11% kemudian mengalami penurunan pada pertanyaan nomor 2 sebesar 68,56%, kemudian

pertanyaan nomor 3 mengalami peningkatan menjadi 81,19%, dan seterusnya setiap pertanyaan mengalami penurunan dan kenaikan pada pertanyaan berikutnya.

Adapun rumus yang digunakan adalah :

$$T_{ki} = \frac{X_i}{Y_i} \times 100\% \quad (\text{Supranto, 2007:241})$$

Dimana : T_{ki} = Tingkat kesesuaian responden

X_i = Skor penilaian petugas

Y_i = Skor penilaian kepentingan masyarakat

Selanjutnya sumbu mendatar (X) akan diisi oleh skor tingkat petugas, sedangkan sumbu tegak (Y) akan diisi oleh skor tingkat kepentingan masyarakat. Dalam penyederhanaan rumus, maka untuk setiap faktor yang mempengaruhi pelaksanaan program Kampung KB dengan :

$$\bar{X} = \frac{X_i}{n}$$

$$\bar{Y} = \frac{Y_i}{n}$$

Di mana : \bar{X} = Skor rata-rata tingkat pelaksanaan petugas

\bar{Y} = Skor rata-rata tingkat kepentingan masyarakat

N = Jumlah responden

$$\bar{X} = \frac{52}{29}$$

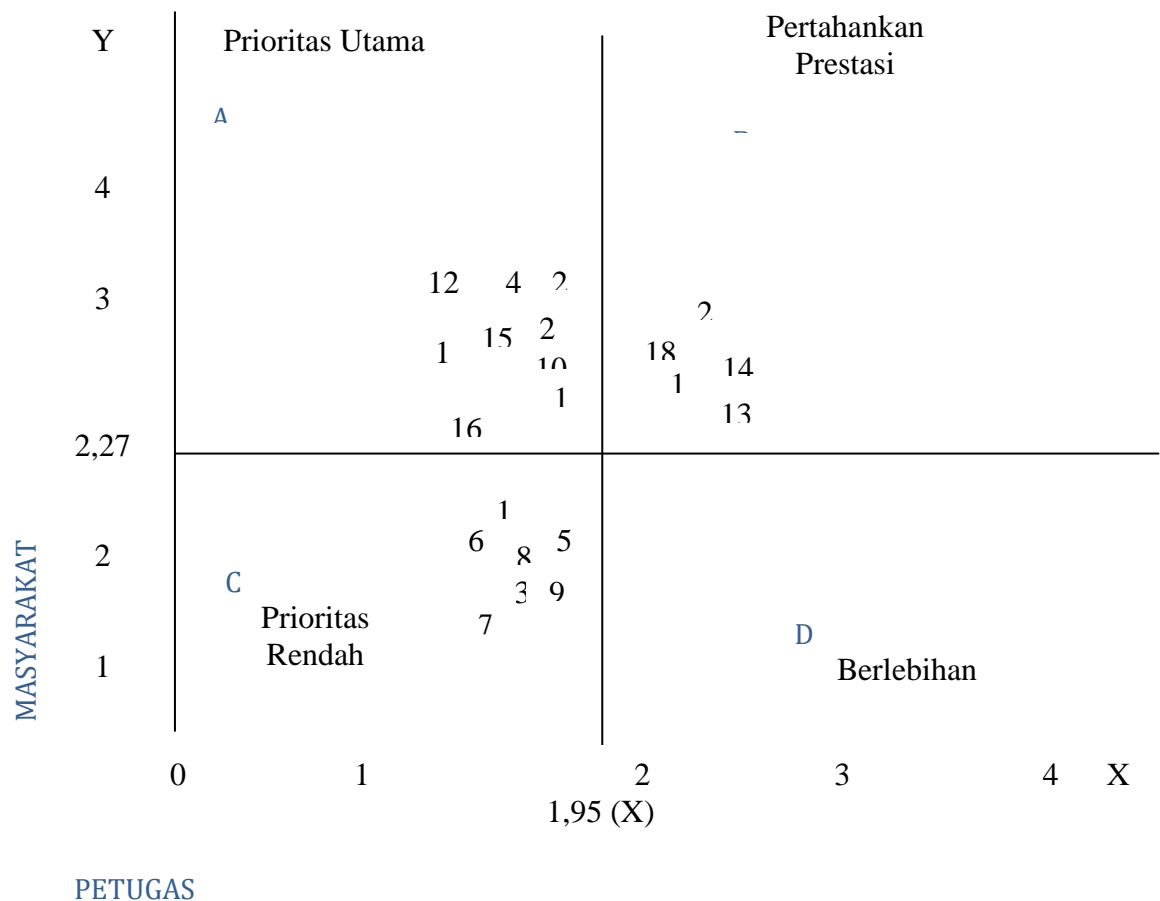
$$X = 179,31$$

$$\bar{Y} = \frac{74}{29}$$

$$Y = 255,17$$

Tabel 4.132 Tabulasi Nilai Bobot dan Nilai Kesesuaian Program Kampung KB

No	Indikator Pertanyaan	Bobot		\bar{X}	\bar{Y}
		Masyarakat	Petugas		
	INPUT				
1	Jumlah tenaga pengelola kampung di Kampung KB	52	74	179,31	255,17
2	Jumlah Kepemilikan Sarana dan Prasarana di Kampung KB	54	73	186,20	251,72
3	Jumlah Keterlibatan Pemerintah Daerah/Lintas Sektor/Mitra di Kampung KB memadai	59	61	203,44	210,34
4	Jumlah Dana di Kampung KB mencukupi	52	46	179,31	158,62
	PROSES				
5	Frekuensi kegiatan seksi keagamaan di Kampung KB	70	72	241,37	248,27
6	Frekuensi kegiatan seksi pendidikan di Kampung KB	58	70	200	241,37
7	Frekuensi kegiatan seksi reproduksi di Kampung KB	53	62	182,75	213,79
8	Frekuensi kegiata seksi ekonomi di Kampung KB	48	72	165,51	248,27
9	Frekuensi kegiatan seksi perlindungan di Kampung KB	53	63	182,75	217,24
10	Frekuensi kegiatan kasih sayang di Kampung KB	56	75	193,10	258,62
11	Frekuensi kegiatan seksi sosial budaya di Kampung KB	57	68	196,55	234,48
12	Frekuensi kegiatan seksi pembinaan lingkungan di Kampung KB	53	66	182,75	227,58
13	Pertemuan evaluasi pelaksanaan rencana kerja POKJA dengan mitra di Kampung KB	62	68	213,79	234,48
	OUTPUT				
14	Jumlah Kesertaan ber-KB per Mix Kontrasepsi di Kampung KB	73	76	251,72	262,06
15	Jumlah PUS yang tidak pakai KB di Kampung KB	54	73	186,20	251,72
16	Jumlah BKB di Kampung KB	72	74	248,27	255,17
17	Jumlah BKR di Kampung KB	63	71	217,24	244,82
18	Bapak/Ibu puas terhadap Jumlah BKL di Kampung KB	61	77	210,34	265,51
19	Cakupan Kesertaan Keluarga dalam Poktan di Kampung KB	55	73	189,65	251,72
20	Semakin berkembangnya budi pekerti, tata krama dan seni budaya baik di keluarga maupun masyarakat sekampung	66	77	227,58	265,51
21	Semakin tertatanya lingkungan yang serasi selaras dan seimbang antara perilaku dan lingkungan	59	77	203,44	265,51
	Total	1230	1467	4241,27	5058,53
	Rata2	58,57143	69,8574	201,962	240,8824



Pada grafik diatas menggambarkan hasil pengukuran unsur-unsur jasa pelayanan berdasarkan tingkat kepentingan dan kinerjanya yang memungkinkan pihak pemerintah untuk dapat menitikberatkan usaha-usaha perbaikan untuk hal-hal atau atribut yang benar-benar dianggap penting saja oleh para masyarakat, agar dapat memuaskan ! untuk memperoleh titik-titik pada diagram kartesius yang sebelumnya perlu dihitung terlebih dahulu nilai rataa-rata.

Pada grafik diatas dapat dilihat bahwa letak dari unsur-unsur pelaksanaan faktor-faktor atau atribut yang mempengaruhi optimalisasi pelaksanaan program kampung KB yang terbagi menjadi empat bagian. Adapun interprestasi dari diagram kartesius tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Kuadran A

Menunjukkan faktor-faktor atau atribut yang mempengaruhi optimalisasi implementasi program Kampung KB berada dalam kuadran ini dan penanganannya perlu diprioritaskan, karena keberadaan faktor-faktor inilah yang dinilai sangat penting oleh masyarakat dan efektivitas kinerja petugas, sedangkan tingkat pelaksanaannya masih belum memuaskan.

Faktor-faktor yang termasuk dalam kuadran ini adalah :

- Jumlah tenaga pengelola kampung di Kampung KB sudah (1)
- Jumlah Kepemilikan Sarana dan Prasarana di Kampung KB (2)
- Jumlah Dana di Kampung KB sudah (4)
- Frekuensi kegiatan kasih sayang di Kampung KB(10)
- Frekuensi kegiatan seksi sosial budaya di Kampung KB(11)
- Frekuensi kegiatan seksi pembinaan lingkungan di Kampung KB (12)
- Jumlah PUS yang tidak pakai KB di Kampung KB(15)
- Jumlah BKB di Kampung KB(16)
- Semakin tertatanya lingkungan yang serasi selaras dan seimbang antara perilaku dan lingkungan(21)

2. Kuadran B : Pertahankan Prestasi

Menunjukkan faktor-faktor yang mempengaruhi optimalisasi implementasi program Kampung KB. Kuadran ini perlu dipertahankan, karena pada umumnya tingkat pelaksanaan telah sesuai dengan

kepentingan dan harapan kedua belah pihak, sehingga dapat mencapai optimalisasi maksimal.

Faktor-faktor yang termasuk dalam kuadran B ini adalah :

- Pertemuan evaluasi pelaksanaan rencana kerja POKJA dengan mitra di Kampung KB (13)
- Jumlah Kesertaan ber-KB per Mix Kontrasepsi di Kampung KB(14)
- Jumlah BKR di Kampung KB(17)
- Bapak/Ibu puas terhadap Jumlah BKL di Kampung KB(18)
- Semakin berkembangnya budi pekerti, tata krama dan seni budaya baik di keluarga maupun masyarakat sekampung(20)

3. Kuadran C : Prioritas Rendah

Menunjukkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi optimalisasi implementasi program Kampung KB berada dalam kuadran ini dinilai masih dianggap kurang penting bagi masyarakat dan petugas, sedangkan kualitas pelaksanaannya biasa atau cukup saja.

Adapun yang termasuk dalam kuadran C ini adalah :

- Apakah Jumlah Keterlibatan Pemerintah Daerah/Lintas Sektor/Mitra di Kampung KB memadai (3)
- Frekuensi kegiatan seksi keagamaan di Kampung KB (5)
- Frekuensi kegiatan seksi pendidikan di Kampung KB (6)
- Frekuensi kegiatan seksi reproduksi di Kampung KB (7)
- Frekuensi kegiatan seksi ekonomi di Kampung KB (8)
- Frekuensi kegiatan seksi perlindungan di Kampung KB(9)
- Cakupan Kesertaan Keluarga dalam Poktan di Kampung KB(19)

4. Kuadran D : Berlebihan

Menunjukkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dalam optimalisasi program Kampung KB berada dalam kuadran ini dinilai berlebihan dalam pelaksanaannya, hal ini terutama disebabkan karena masyarakat dan petugas menganggap tidak terlalu penting terhadap adanya faktor tersebut, akan tetapi pelaksanaannya dilakukan dengan baik sekali oleh petugas, sehingga sangat memuaskan, akan tetapi menjadi lebih mahal. Namun hasil kajian tidak ada yang masuk dalam prioritas ini.

Artinya pemerintah tidak melakukan program yang berlebihan di kampung KB.

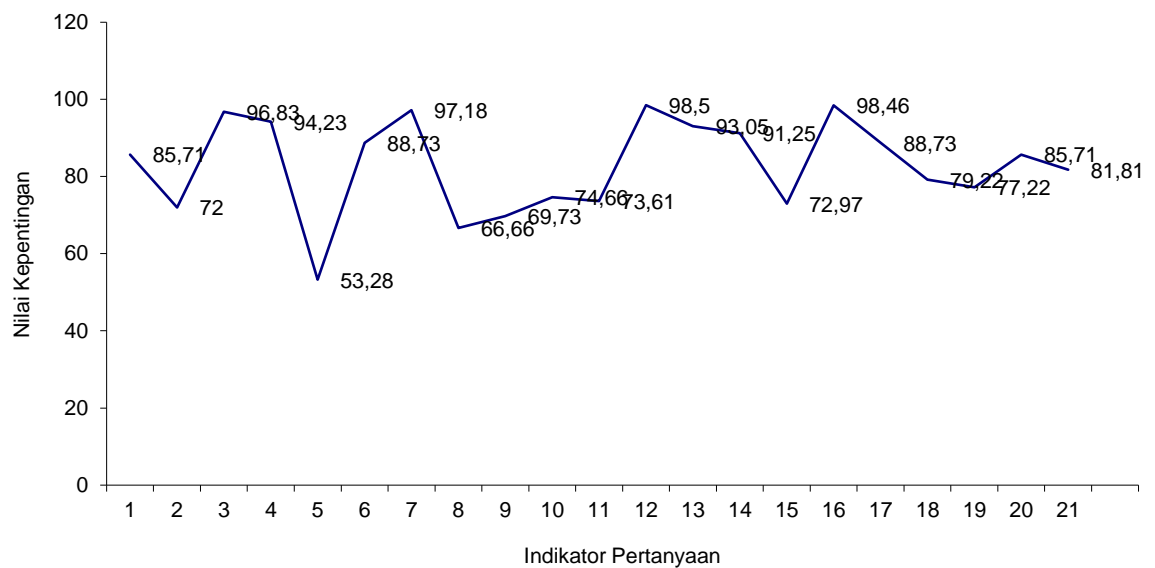
Faktor-faktor yang termasuk dalam kuadran D ini adalah : tidak ada

4.2.3. Pembahasan Kabupaten Asahan

Dari hasil analisa atas setiap butir pernyataan, baik untuk kepentingan maupun untuk penilaian kinerja, kemudian dimasukkan ke dalam tabel kesimpulan atas setiap butir pertanyaan tersebut :

Tabel 4.133 Tabulasi Nilai Bobot dan Nilai Kesesuaian

No	Indikator Pertanyaan	Bobot		Nilai Kesesuaian
		Masyarakat	Petugas	
	INPUT			
1	Jumlah tenaga pengelola kampung di Kampung KB sudah	66	77	85,71%
2	Jumlah Kepemilikan Sarana dan Prasarana di Kampung KB	54	75	72%
3	Apakah Jumlah Keterlibatan Pemerintah Daerah/Lintas Sektor/Mitra di Kampung KB memadai	63	61	96,83%
4	Jumlah Dana di Kampung KB sudah	49	52	94,23%
	PROSES			
1	Frekuensi kegiatan seksi keagamaan di Kampung KB	74	72	53,28%
2	Frekuensi kegiatan seksi pendidikan di Kampung KB	63	71	88,73%
3	Frekuensi kegiatan seksi reproduksi di Kampung KB	69	71	97,18%
4	Frekuensi kegiatan seksi ekonomi di Kampung KB	48	72	66,66%
5	Frekuensi kegiatan seksi perlindungan di Kampung KB	53	76	69,73%
6	Frekuensi kegiatan kasih sayang di Kampung KB	56	75	74,66%
7	Frekuensi kegiatan seksi sosial budaya di Kampung KB	53	72	73,61%
8	Frekuensi kegiatan seksi pembinaan lingkungan di Kampung KB	66	67	98,50%
9	Pertemuan evaluasi pelaksanaan rencana kerja POKJA dengan mitra di Kampung KB	67	72	93,05%
	OUTPUT			
1	Jumlah Kesertaan ber-KB per Mix Kontrasepsi di Kampung KB	80	73	91,25%
2	Jumlah PUS yang tidak pakai KB di Kampung KB	54	74	72,97%
3	Jumlah BKB di Kampung KB	73	74	98,46%
4	Jumlah BKR di Kampung KB	63	71	88,73%
5	Bapak/Ibu puas terhadap Jumlah BKL di Kampung KB	61	77	79,22%
6	Cakupan Kesertaan Keluarga dalam Poktan di Kampung KB	60	77	77,22%
7	Semakin berkembangnya budi pekerti, tata krama dan seni budaya baik di keluarga maupun masyarakat sekampung	66	77	85,71%
8	Semakin tertatanya lingkungan yang serasi selaras dan seimbang antara perilaku dan lingkungan	63	77	81,81%
	Total	1.301	1.513	
	Rata2	61,95	72,05	72,00



Gambar-4.5. Grafik nilai kesesuaian antara kepentingan masyarakat dari kinerja petugas.

Pada gambar diatas dapat diketahui perkembangan tingkat kesesuaian antara penilaian masyarakat yang diberikan dan penilaian petugas kampung KB. Pada gambar tersebut diketahui tingkat kesesuaian pada umumnya cenderung mengalami fluktuasi, yaitu kenaikan dan penurunan pada setiap pertanyaan yang berbeda.

Pada pertanyaan pertama tingkat kesesuaian sebesar 77,11% kemudian mengalami penurunan pada pertanyaan nomor 2 sebesar 68,56%, kemudian pertanyaan nomor 3 mengalami peningkatan menjadi 81,19%, dan seterusnya setiap pertanyaan mengalami penurunan dan kenaikan pada pertanyaan berikutnya.

Adapun rumus yang digunakan adalah :

$$T_{ki} = \frac{X_i}{Y_i} \times 100\% \quad (\text{Supranto, 2007:241})$$

Dimana : T_{ki} = Tingkat kesesuaian responden

X_i = Skor penilaian petugas

Y_i = Skor penilaian kepentingan masyarakat

Selanjutnya sumbu mendatar (X) akan diisi oleh skor tingkat petugas, sedangkan sumbu tegak (Y) akan diisi oleh skor tingkat kepentingan masyarakat. Dalam penyederhanaan rumus, maka untuk setiap faktor yang mempengaruhi pelaksanaan program Kampung KB dengan :

$$\bar{X} = \frac{X_i}{n}$$

$$\bar{Y} = \frac{Y_i}{n}$$

Di mana : \bar{X} = Skor rata-rata tingkat pelaksanaan petugas

\bar{Y} = Skor rata-rata tingkat kepentingan masyarakat

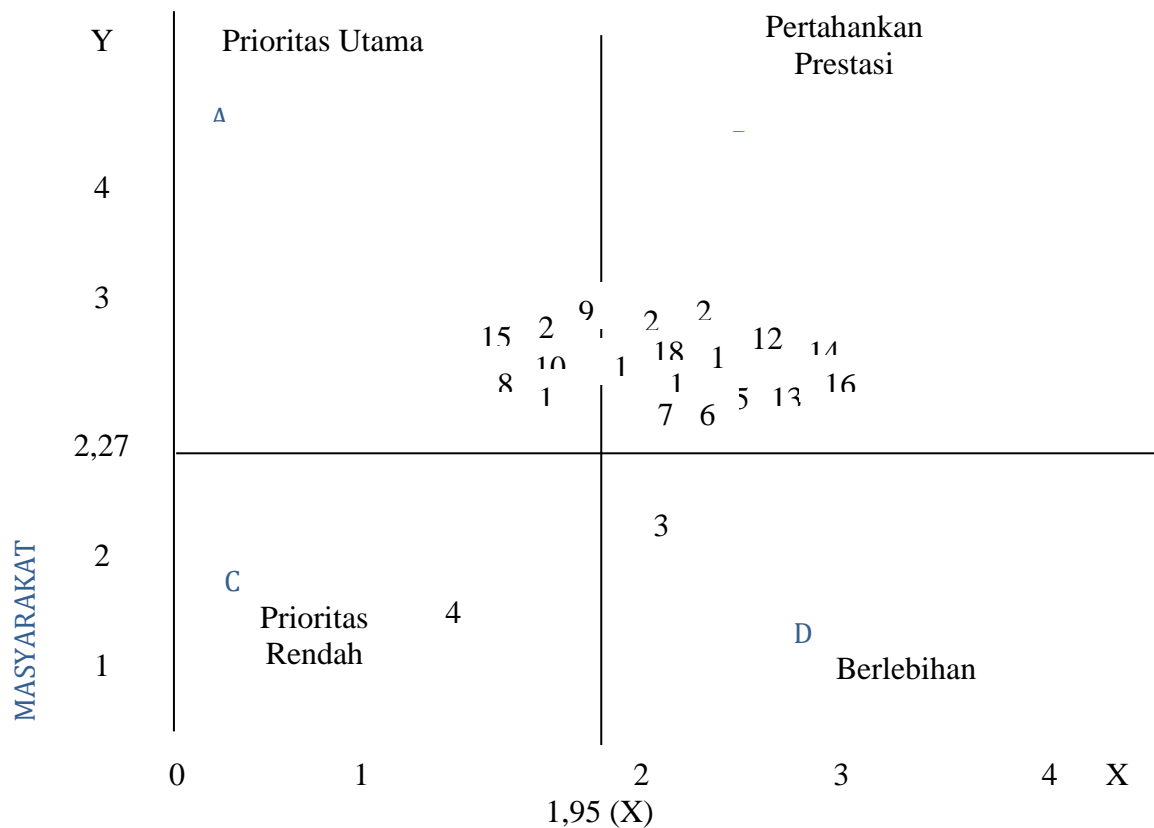
N = Jumlah responden

$\bar{X} = \frac{66}{29}$
$\bar{X} = 2,28$

$\bar{Y} = \frac{77}{29}$
$\bar{Y} = 2,66$

Tabel 4.134 Tabulasi Nilai Bobot dan Nilai Kesesuaian Program Kampung KB

No	Indikator Pertanyaan	Bobot		\bar{X}	\bar{Y}
		Masyarakat	Petugas		
	INPUT				
1	Jumlah tenaga pengelola kampung di Kampung KB sudah	66	77	2,28	2,66
2	Jumlah Kepemilikan Sarana dan Prasarana di Kampung KB	54	75	1,86	2,59
3	Apakah Jumlah Keterlibatan Pemerintah Daerah/Lintas Sektor/Mitra di Kampung KB memadai	63	61	2,17	2,10
4	Jumlah Dana di Kampung KB sudah	49	52	1,69	1,79
	PROSES				
5	Frekuensi kegiatan seksi keagamaan di Kampung KB	74	72	2,55	2,48
6	Frekuensi kegiatan seksi pendidikan di Kampung KB	63	71	2,17	2,45
7	Frekuensi kegiatan seksi reproduksi di Kampung KB	69	71	2,38	2,45
8	Frekuensi kegiatan seksi ekonomi di Kampung KB	48	72	1,66	2,48
9	Frekuensi kegiatan seksi perlindungan di Kampung KB	53	76	1,83	2,62
10	Frekuensi kegiatan kasih sayang di Kampung KB	56	75	1,93	2,59
11	Frekuensi kegiatan seksi sosial budaya di Kampung KB	53	72	1,83	2,48
12	Frekuensi kegiatan seksi pembinaan lingkungan di Kampung KB	66	67	2,28	2,31
13	Pertemuan evaluasi pelaksanaan rencana kerja POKJA dengan mitra di Kampung KB	67	72	2,31	2,48
	OUTPUT				
14	Jumlah Kesertaan ber-KB per Mix Kontrasepsi di Kampung KB	80	73	2,76	2,52
15	Jumlah PUS yang tidak pakai KB di Kampung KB	54	74	1,86	2,55
16	Jumlah BKB di Kampung KB	73	74	2,52	2,55
17	Jumlah BKR di Kampung KB	63	71	2,17	2,45
18	Bapak/Ibu puas terhadap Jumlah BKL di Kampung KB	61	77	2,10	2,66
19	Cakupan Kesertaan Keluarga dalam Poktan di Kampung KB	60	77	2,07	2,66
20	Semakin berkembangnya budi pekerti, tata krama dan seni budaya baik di keluarga maupun masyarakat sekampung	66	77	2,28	2,66
21	Semakin tertatanya lingkungan yang serasi selaras dan seimbang antara perilaku dan lingkungan	63	77	2,17	2,66
	Total	1.301	1.513	44,86	52,17
	Rata2	61,95	72,05	1,95	2,27



PETUGAS

Gambar-4.6 Kartesian Kesesuaian Implementasi Program Kampung KB

Pada grafik diatas menggambarkan hasil pengukuran unsur-unsur jasa pelayanan berdasarkan tingkat kepentingan dan kinerjanya yang memungkinkan pihak pemerintah untuk dapat menitikberatkan usaha-usaha perbaikan untuk hal-hal atau atribut yang benar-benar dianggap penting saja oleh para masyarakat, agar dapat memuaskan ! untuk memperoleh titik-titik pada diagram kartesian yang sebelumnya perlu dihiotung terlebih dahulu nilai rataa-rata.

Pada grafik diatas dapat dilihat bahwa letak dari unsur-unsur pelaksanaan faktor-faktor atau atribut yang mempengaruhi optimalisasi pelaksanaan program kampung KB yang terbagi menjadi empat bagian. Adapun interprestasi dari diagram kartesian tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

5. Kuadran A

Menunjukkan faktor-faktor atau atribut yang mempengaruhi optimalisasi implementasi program Kampung KB berada dalam kuadran ini dan

penanganannya perlu diprioritaskan, karena keberadaan faktor-faktor inilah yang dinilai sangat penting oleh masyarakat dan efektivitas kinerja petugas, sedangkan tingkat pelaksanaannya masih belum memuaskan.

Faktor-faktor yang termasuk dalam kuadran ini adalah :

- Jumlah Kepemilikan Sarana dan Prasarana di Kampung KB (2)
- Frekuensi kegiatan seksi ekonomi di Kampung KB (8)
- Frekuensi kegiatan seksi perlindungan di Kampung KB(9)
- Frekuensi kegiatan kasih sayang di Kampung KB(10)
- Frekuensi kegiatan seksi sosial budaya di Kampung KB(11)
- Jumlah PUS yang tidak pakai KB di Kampung KB(15)

a. Kuadran B : Pertahankan Prestasi

Menunjukkan faktor-faktor yang mempengaruhi optimalisasi implementasi program Kampung KB. Kuadran ini perlu dipertahankan, karena pada umumnya tingkat pelaksanaan telah sesuai dengan kepentingan dan harapan kedua belah pihak, sehingga dapat mencapai optimalisasi maksimal.

Faktor-faktor yang termasuk dalam kuadran B ini adalah :

- Jumlah tenaga pengelola kampung di Kampung KB sudah (1)
- Frekuensi kegiatan seksi keagamaan di Kampung KB (5)
- Frekuensi kegiatan seksi pendidikan di Kampung KB (6)
- Frekuensi kegiatan seksi reproduksi di Kampung KB (7)
- Frekuensi kegiatan seksi pembinaan lingkungan di Kampung KB (12)
- Pertemuan evaluasi pelaksanaan rencana kerja POKJA dengan mitra di Kampung KB (13)
- Jumlah Kesertaan ber-KB per Mix Kontrasepsi di Kampung KB(14)
- Jumlah BKB di Kampung KB(16)
- Jumlah BKR di Kampung KB(17)
- Bapak/Ibu puas terhadap Jumlah BKL di Kampung KB(18)
- Cakupan Kesertaan Keluarga dalam Poktan di Kampung KB(19)
- Semakin berkembangnya budi pekerti, tata krama dan seni budaya baik di keluarga maupun masyarakat sekampung(20)

- Semakin tertatanya lingkungan yang serasi selaras dan seimbang antara perilaku dan lingkungan(21)

b. Kuadran C : Prioritas Rendah

Menunjukkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi optimalisasi implementasi program Kampung KB berada dalam kuadran ini dinilai masih dianggap kurang penting bagi masyarakat dan petugas, sedangkan kualitas pelaksanaannya biasa atau cukup saja.

Adapun yang termasuk dalam kuadran C ini adalah :

- Jumlah Dana di Kampung KB sudah (4)

c. Kuadran D : Berlebihan

Menunjukkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dalam optimalisasi program Kampung KB berada dalam kuadran ini dinilai berlebihan dalam pelaksanaannya, hal ini terutama disebabkan karena masyarakat dan petugas menganggap tidak terlalu penting terhadap adanya faktor tersebut, akan tetapi pelaksanaannya dilakukan dengan baik sekali oleh petugas, sehingga sangat memuaskan, akan tetapi menjadi lebih mahal. Namun hasil kajian tidak ada yang masuk dalam prioritas ini. Artinya pemerintah tidak melakukan program yang berlebihan di kampung KB.

Faktor-faktor yang termasuk dalam kuadran D ini adalah : Apakah Jumlah Keterlibatan Pemerintah Daerah/Lintas Sektor/Mitra di Kampung KB memadai (3), dimana keterlibatan pemerintah daerah sangat kurang dan hampir dikatakan kurang berperan dalam pengembangan Kampung KB.

Banyaknya kegiatan yang masih harus diprioritaskan di Kampung KB menjadikan kebijakan yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah dalam mengembangkan Kampung KB perlu dilakukan dengan baik. Berikut penjabaran ringkasan hasil wawancara yang dilakukan di tiga kabupaten.

Tabel 4.135 Matrix Hasil Wawancara dan Observasi

No	Indikator	Kategori Jawaban Paling banyak	Kabupaten
I	Input		
	SDM	Kurang Mencukupi Mencukupi	Labura, Batubara Asahan
	Sarana dan Praarana	Kurang memadai Memadai	Labura, Batubara, Asahan
	Kebijakan	Perlu keterlibatan dan koordinasi	Labura, Batubara, Asahan

II	Proses		
	Kegiatan Pendidikan	Tidak berjalan	Labura, Batubara, Asahan
	Kegiatan EKonomi	Kurang berjalan	Labura, Batubara, Asahan
	Kegiatan Sosial	Sedikit berjalan	Labura, Batubara, Asahan
	Kegiatan Lingkungan	Sedikit berjalan	Labura, Batubara, Asahan
III	Output		
	SDM	Kurang mendukung Mendukung	Labura, Batubara Asahan
	Sarana dan Praarana	Kurang mendukung	Labura, Batubara, Asahan
	Kebijakan	Belum adanya keterlibatan dan koordinasi	Labura, Batubara, Asahan

Sumber : waawancara/observasi,2018

Berdasarkan hasil matrix jawaban wawancara kepada pihak yang terkait seperti petugas kampung KB, kepala desa dan dinas terkait, sebagian besar jawaban masih kurang berjalan dengan baik kegiatan di Program Kampung KB yang ada di ketiga kabupaten, yaitu Labuhan Batu Utara, Batubara dan Asahan. Sebagian besar informan masih menganggap tenaga Program Kampung KB masih belum mencukupi, bahkan diperlukan satu desa memiliki satu petugas Program Kampung KB, sedangkan yang ada selama ini bahkan satu kecamatan hanya ada satu petugas. Kurangnya petugas juga dirasakan dapat mengurangi optimalisasi pelaksanaan dan kegiatan-kegiatan yang ada di Program Kampung KB seperti kegiatan pendidikan, ekonomi, sosial, lingkungan, keamanan dan kegiatan lain yang ada di Program Kampung KB.

Kemudian mengenai sarana dan prasarana juga sebagian besar dan hampir seluruhnya menyatakan masih belum memadai, masih kurang dan belum mencukupi untuk mendukung operasional Program Kampung KB. Sarana seperti kantor masih belum ada dan masih menumpang kegiatan di balai desa dan kegiatan pos yandu serta kegiatan lain dari dinas kesehatan dan BKKBN kabupaten. Mengenai pendanaan juga masih banyak yang kurang dan belum ada pos khusus yang ada di Program Kampung KB. Walaupun ada ketentuan bisa menggunakan dana desa, namun tidak ada kepala desa yang berani mencairkan untuk penggunaan di Program Kampung KB sehingga juga kurang ada koordinasi antar dinas dan perangkat skpd terkait.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

1. Kebijakan yang masuk dalam prioritas utama yang harus dioptimalkan di Kampung KB yang selama ini masih belum dioptimalkan dengan baik, namun sangat penting dan harus dilakukan prioritas utama yaitu :
 - a. Frekuensi kegiatan seksi keagamaan
 - b. Frekuensi kegiatan seksi pendidikan
 - c. Frekuensi kegiatan seksi perlindungan
 - d. Frekuensi kegiatan seksi sosial budaya
 - e. Frekuensi kegiatan seksi pembinaan lingkungan
 - f. Pertemuan evaluasi pelaksanaan rencana kerja POKJA dengan mitra
 - g. Jumlah PUS yang tidak pakai KB
 - h. Bapak/Ibu puas terhadap Jumlah BKL
 - i. Cakupan Kesertaan Keluarga dalam Poktan
 - j. Semakin berkembangnya budi pekerti, tata krama dan seni budaya baik di keluarga maupun masyarakat sekampung
 - k. Semakin tertatanya lingkungan yang serasi selaras dan seimbang antara perilaku dan lingkungan
 - l. Jumlah tenaga pengelola kampung di Kampung KB
 - m. Jumlah Kepemilikan Sarana dan Prasarana di Kampung KB
 - n. Jumlah Dana di Kampung KB
 - o. Frekuensi kegiatan kasih sayang di Kampung KB
 - p. Jumlah BKB di Kampung KB
 - q. Frekuensi kegiatan seksi ekonomi di Kampung KB
 - r. Frekuensi kegiatan seksi perlindungan di Kampung KB
2. Kebijakan yang sudah dilakukan dengan baik dan dapat dipertahankan prestasi yang sudah dioptimalkan di Kabupaten Batubara di Kampung KB yaitu.
 - a. Jumlah BKR di Kampung KB
 - b. Jumlah Keterlibatan Pemerintah Daerah/Lintas Sektor/Mitra

- c. Frekuensi kegiatan seksi reproduksi
 - d. Jumlah BKR
3. Kebijakan yang masuk dalam prioritas rendah dan harus di dioptimalkan lagi di Kampung KB yaitu tidak ada, artinya prioritas program Kampung KB memang tidak ada yang berada dalam kategori yang perioritas rendah, hal tersebut mengindikasikan bahwa kampung KB sangat penting dan berguna bagi peningkatan kapasitas dan produktivitas kegiatan yang positif di masyarakat.
 4. Kebijakan yang berebihan dilakukan oleh pemerintah daerah tidak ada. Artinya selama ini pemerintah daerah belum banyak melakukan secara optimal program yang ada di Kampung KB.

5.2 Saran

1. Perlu didirikan kantor cabang Kampung KB di setiap Desa, seluruh kampung KB masih menumpang sebagian besar di Kantor Kepala Desa, oleh karena itu untuk meningkatkan efektivitas kerja diperlukan kantor yang representatif dalam mendukung pelaksanaan program Kampung KB.
2. Perlu diberikan anggaran khusus Kampung KB di setiap Desa, dimana anggaran yang selama ini masih terbatas dan hanya sebagai tambahan operasional.
3. Perlu didirikan mitra masyarakat dan Kampung KB di setiap Desa, dimana mitra yang ada mencakup seluruh aspek mitra misalnya perdagangan, ukm, koperasi, industri dan lain-lain, yang mendukung output dan operasional kampung KB.
4. Perlu penambahan terhadap jumlah petugas di kampung KB, dimana setiap desa seharusnya ada satu petugas yang menangani khusus kampung KB di setiap Kabupaten, hal tersebut untuk memudahkan pelayanan dan aktivitas di masyarakat.
5. Perlu pemberian reward kepada petugas kampung KB dan masyarakat yang berprestasi dalam mengembangkan kampung KB di setiap desa masing-masing.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi, 2012, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Badan Pusat Statistik. 2010. *Hasil Sensus Penduduk Indonesia Tahun 2010*. Jakarta: Badan Pusat Statistik: Republik Indonesia
- _____. 2013. *Poyeksi Penduduk Indonesia Tahun 2010-2035*. Jakarta: Badan Pusat Statistik: Republik Indonesia
- BKKBN. 2013. *Profil Kependudukan dan Pembangunan di Indonesia tahun 2013*. Jakarta: BKKBN
- BKKBN. 2015 *Petunjuk Teknis Kampung KB*. Jakarta : BKKBN Kementerian PMK. 2016. *Revolusi Mental*. Jakarta : Kementerian PMK
- Badan Pusat Statistik, 2012, *Laporan BPS tahun 2016*. Scientific Co-operation, tumbingen Federal Republic of Germany.
- Daldjoeni N, 1986, *Masalah Penduduk dalam Fakta dan Angka*, Alumni Bandung
- Eko Prasetya. 2016. *Ikuti Arahan Jokowi, BKKBN Bentuk Kampung KB*, (Online), (<https://www.merdeka.com/peristiwa/ikuti-arahan-jokowibkkbn-bentuk-programkampung-kb.html>, diakses 30 Agustus 2016) Karya Akademis:
- Goeltenboth, F. 1996, *Applied Geography and Development*, Volume 47 Institute for
- Internet: Soerabaia *NewsweekMonday*. 2016. *BKKBN Canangkan Dusun Ambeng-Ambeng Sebagai Kampung KB*, (online), (<http://www.surabayanewsweek.com/2016/03/bkkbn-canangkan-dusun-ambeng-ambeng.html>, diakses 29 Agustus 2016)
- Lembaga Demografi, FEU I, 1981, *Dasar-dasar Demografi FEUI*, Jakarta. Tji
- Mardikanto, Totok, dan Soebiato, Poerwoko. 2015. *Pemberdayaan masyarakat, dalam perspektif kebijakan publik*. Bandung: Alfabeta. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. 2015 *Petunjuk Teknis Kampung Keluarga Berencana*.
- Pedoman Pengelolaan Kampung KB (Pedoman bagi Pengelola Kampung KB di Lini Lapangan)* Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional Tahun 2017
- Rusiadi., Subianto, Nur., dan Hidayat, Rahmat. 2013. *Metode Penelitian: Manajemen, Akuntansi dan Ekonomi Pembangunan*. Medan: USU Press
- Suharyanto, P, *Urbanisasi*, Surabaya Post, 23 September 1996
- Undang-undang No. 52 tahun 2009 tentang *Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga*. Pasal 3 ayat (a) & (b) *Emil : Sosialisasi KB di Gakin Masih Kurang*.
- Soegimo, Dibyoo., dkk. 2009. *Geografi*. Jakarta: Pusbuk Depdiknas

- Wardani,FK, 2010, Partisipasi Masyarakat Dalam Mengikuti Program Keluarga Berencana di Desa Sidoharjo, Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten. Skripsi Universitas Sebelas Maret Surakarta Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan.
- Merrynce, Hidir, Ahmad, 2013, Efektivitas Pelaksanaan Program Keluarga Berencana Pada Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi. Jurnal Universitas Riau Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Program Studi Ilmu Administrasi Negara. Vol. 4No.1 Peraturan-peraturan: □ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia^[1]_{SEP} Nomor
- Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga

